

**GUBERNUR BANTEN**  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
- b. bahwa pengaturan mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 000.8.2/8671/Bangda tanggal 4 Agustus 2023 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan maksud dijadikan sebagai:

- a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
  - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi perangkat daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022;
  - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
  - f. BAB VI Penutup.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 7 Agustus 2023  
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 7 Agustus 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670619 199403 1 002

BAB VI  
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 untuk menjamin tercapainya sasaran, prioritas, kebijakan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, perubahan ini juga diperlukan dalam rangka penyesuaian sebagai hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah 2023.

Perubahan RKPD 2023 terkait dengan penyesuaian arah kebijakan, target, dan perubahan pagu indikatif dalam kerangka keuangan daerah juga telah memperhitungkan dan memasukkan hasil dan pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan hasil penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah Provinsi Banten dan kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK Pemerintah Pusat) Tahun Anggaran 2023.

Perubahan RKPD tahun 2023 ini juga disusun sebagai dasar didalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002



LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang daerah dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah Provinsi Banten berkewajiban melaksanakan perencanaan pembangunan untuk mencapai target kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan. Perencanaan Tahun 2023 telah disusun pada Tahun Anggaran 2022 dan menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Banten memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Daerah maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2023 telah disusun pada Tahun Anggaran 2022 melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022.

Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, dirasa perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2023 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2023 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

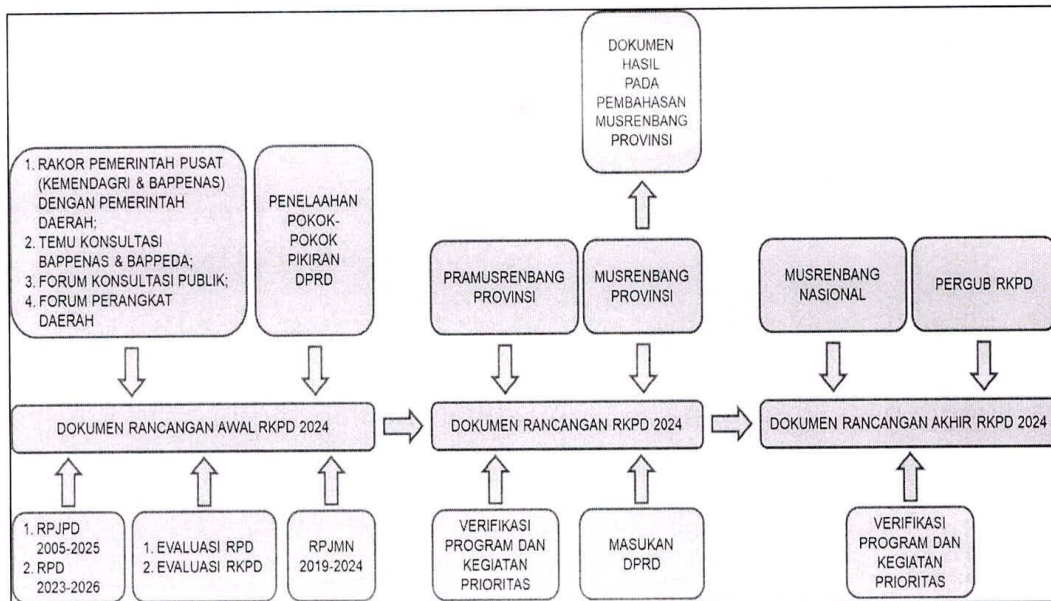
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022, bahwasannya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Provinsi Banten yaitu Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan 4 (empat) misi pembangunan meliputi:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Sebagai informasi tambahan, bahwasannya untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya, terarah dan sistematis, maka penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada beberapa aturan yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih jauh daripada itu Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 sendiri selain berpedoman pada RPJMD/RPD, juga berpedoman pada RKP serta pedoman umum penyusunan RKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.

Arah kebijakan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 difokuskan pada upaya Memperkuat Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Fondasi Tahap Modernisasi. Untuk dapat mencapai fokus

pemantapan tersebut, maka penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1. 1  
 Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan  
 Perubahan RKPD 2023 Provinsi Banten

Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten ini mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026;
2. Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Tahun 2023;
3. Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan acuan Pj. Gubernur dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;
4. Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui

sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Melalui dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini, Pemerintah Daerah Provinsi Banten selalu tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui langkah-langkah inovasi yang memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian beberapa permasalahan di tahun 2023 yang terhimpun melalui 4 (empat) penanganan tematik, meliputi:

1. Tematik Ketahanan Pangan Daerah, dengan langkah-langkah peningkatan prasarana produksi, peningkatan sarana produksi dan distribusi dan pemasaran;
2. Tematik Pengurangan Pengangguran Melalui Penguatan Pendidikan Vokasi dan Kewirausahaan, dengan langkah-langkah peningkatan kerjasama, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, peningkatan kuantitas permintaan tenaga kerja dan penciptaan wirausaha;
3. Tematik Penanganan Stunting, dengan langkah-langkah peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
4. Tematik Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cibanten, dengan langkah-langkah peningkatan pengelolaan sumber daya air, peningkatan edukasi dan sosialisasi, penurunan sedimentasi di DAS Cibanten dengan pengurangan erosi, pengelolaan limbah (industri, Rumah Sakit, peternakan dan domestik serta persampahan, dan pengawasan dan penegakan hukum serta penertiban pemanfaatan ruang;
5. Tematik Manajemen Kinerja Pemerintahan, dengan langkah-langkah penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas keuangan dan penguatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

#### 1.2. Dasar Hukum

Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi

Banten Tahun 2023 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

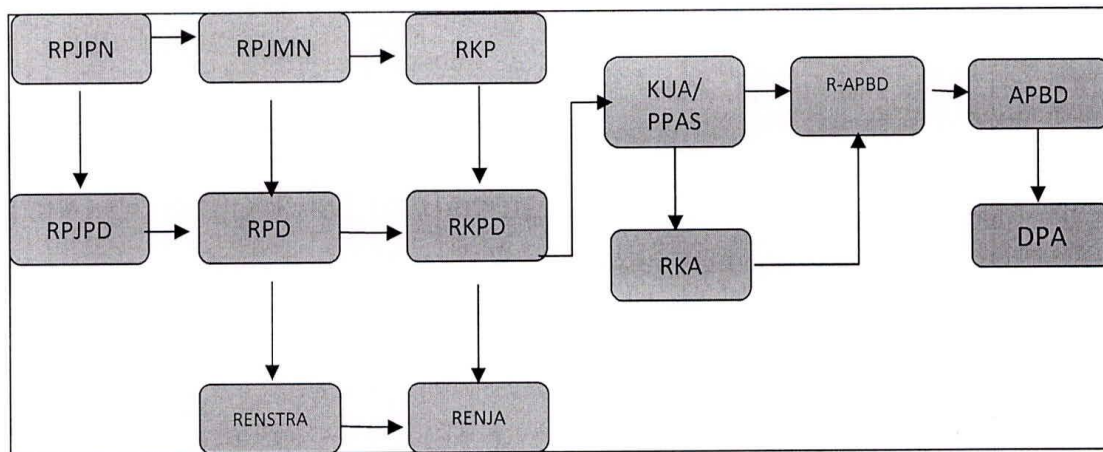
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
  17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
  18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
  19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD Perubahan, yang terdiri dari RKPD Perubahan, KUA-PPAS Perubahan, dan rencana kerja anggaran RKA Perubahan Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 akan menjadi acuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.

Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. 2  
Hubungan Antar Dokumen

Untuk menjamin konsistensi perencanaan tahunan dan jangka menengah daerah RKPD tahun 2023 berpedoman pada RPD 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir, RPD 2023-2026 sendiri disusun dengan memperhatikan RPJPD dan RPJMN selanjutnya RKPD 2023 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS, serta penyusunan RKA Perangkat Daerah. Selain hal tersebut dalam rangka sinergitas dan harmoni perencanaan pembangunan daerah, RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan juga sekaligus menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 antara Gubernur dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD 2023, sebagai berikut nya adalah:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Menyesuaikan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK);
5. Melakukan perubahan kebijakan belanja terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

#### 1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, meliputi:

- a. Penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
- b. Penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK);
- c. Penyesuaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023;
- d. Adanya reklasifikasi belanja pada Perangkat Daerah;
- e. Adanya kewajiban pembayaran pada pihak ketiga;

indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda Provinsi Banten. Berdasarkan analisis capaian yang dilakukan, belum seluruhnya data merupakan realisasi kinerja tahun 2023 yang sesungguhnya, data untuk memberikan kesimpulan tercapai atau tidaknya sasaran strategis yang dimaksud akan ada di akhir tahun perencanaan 2023, namun demikian berdasarkan data sementara yang diperoleh berdasarkan hitungan sementara dan refleksi kondisi maupun capaian di tahun sebelumnya maka hasil tersebut dapat disajikan didalam bab II RKPD Perubahan ini.

Dalam evaluasi pencapaian Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 mengacu pada hasil evaluasi pencapaian sampai dengan TW II Tahun 2023. Untuk capaian Indikator makro ada beberapa yang dirilis Triwulanan seperti LPE.

Capaian Indikator Makro Pembangunan Banten Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, tertuang dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2. 1  
Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target RKPD 2023	Realisasi s/d Triwulan II	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,32	73,27	73,32	Realisasi Tahun 2022
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,03	5,02-5,15	4,68	Rilis BPS Tw 1 2023
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,09	8,67	7,97	Rilis BPS Februari 2023
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,24	5,58	6,17	Rilis BPS Maret 2023
5	Indeks Gini	Poin	0,377	0,354	0,377	Realisasi Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Banten

#### A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini

digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Gambar 2. 1  
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2022  
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terepresentasikan melalui capaian IPM Banten Tahun 2022. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 73,32 poin dan mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 72,60-73,60 poin sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2022 termasuk pada klasifikasi “tinggi” dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,6 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nasional IPM Provinsi Banten lebih baik dari IPM nasional yaitu 72,91 poin, dimana Banten menempati peringkat ke-8 dengan status IPM tertinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2022 mencapai 70,39 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2022

mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun. Sepanjang periode 2010 hingga 2022, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,89 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 telah mencapai 13,05 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2022 telah mencapai 9,13 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp.3,10 triliun atau 25,92% dari belanja daerah (ketentuan minimal 20%); 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rp1,35 triliun atau 13,64% dari belanja daerah (ketentuan minimal 10%); 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten kota dan peran serta dunia usaha/masyarakat dalam rangka penyediaan RS Swasta di Banten; 4) Kemudahan perizinan pendirian RS dan lembaga pendidikan dan pelatihan mandiri; 5) Daya beli masyarakat semakin meningkat. Strategi kedepan RS Daerah yang telah dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan yang mumpuni menuju *health tourism*.

Tabel 2. 2  
Target Komponen Indikator IPM Tahun 2023

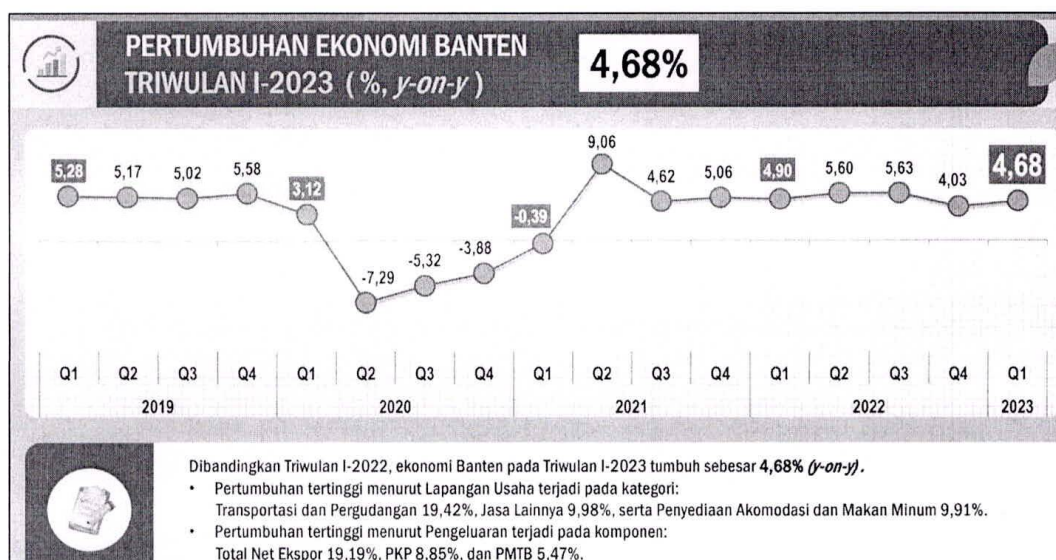
No	Indikator IPM	Target Tahun 2023
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,40 Tahun
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,75 Tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,11 Tahun
4	Pengeluaran Perkapita	Rp. 12.168.000

Sumber : BPS Provinsi Banten

## B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah.

Pemerintah RI resmi mencabut kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di seluruh wilayah Indonesia pada 30 Desember 2022. Pada triwulan I-2023, mobilitas penduduk dan aktivitas perekonomian sudah mendekati kondisi pra pandemi COVID-19. • Momen cuti bersama dan perayaan Tahun Baru Imlek dan Hari Suci Nyepi turut menopang beberapa aktivitas perekonomian, diantaranya pada sektor transportasi dan pariwisata. • Momen persiapan dan minggu pertama Bulan Ramadhan di triwulan I-2023 turut mendorong konsumsi masyarakat. • Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) secara nasional pada triwulan I-2023 mencapai 50,75%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan masih berada pada fase ekspansi (indeks > 50%). Perkembangan PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan Lapangan Usaha Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia.



Gambar 2. 2  
Laju Pertumbuhan Ekonomi TW 1 2023  
Sumber: BPS Provinsi Banten

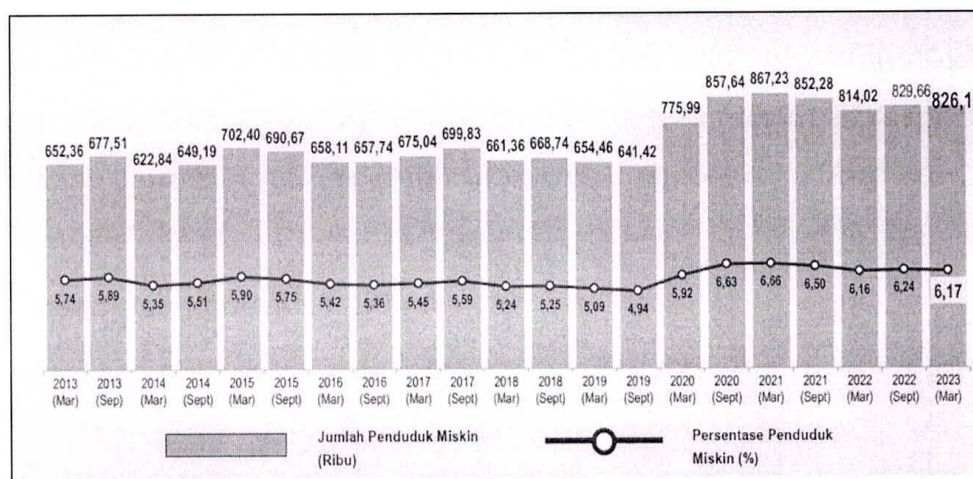
Secara kumulatif, ekonomi Banten triwulan I-2023 dibandingkan dengan triwulan I-2022 tumbuh sebesar 4,68% (c-to-c). Seluruh leading sektor, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Real Estat serta Pertanian melanjutkan tren positif sejak

triwulan I-2022. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi & Pergudangan serta Akomodasi & Makan Minum yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan.

Beberapa lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Banten pada triwulan I-2023 adalah sektor industry sebesar 30,22%, Perdagangan besar 12,56% dan konstruksi 11,84%. Untuk sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar pada TW 1 adalah transportasi pergudangan 19,42% dan penyediaan akomodasi 9,91%. Pertumbuhan didorong terutama oleh kinerja positif Industri Makanan Minuman, Industri Logam Dasar; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; serta Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik. Perdagangan tumbuh lebih cepat dengan ditopang oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan pasca pandemi COVID-19 dan pencabutan kebijakan PPKM. Informasi Penjelaras Konstruksi tumbuh melambat, Pertumbuhan Konstruksi didukung oleh keberlanjutan proyek konstruksi pemerintah, seperti Jalan Tol Serang-Panimbang, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pengembangan kawasan bisnis dan pemukiman.

### C. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten pada Juli 2023, Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 sebesar 6,17 persen, menurun dibanding periode September 2022 0,07 poin.



Gambar 2. 3  
Perkembangan Kemiskinan Tahun 2013-2023  
Sumber: BPS Provinsi Banten

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 826,13 ribu orang, menurun 3,53ribu orang terhadap September 2023. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan naik sebanyak 36,99 ribu orang (dari 586,21 ribu orang pada September 2022 menjadi 623,19 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 40,52 ribu orang (dari 243,45 ribu orang pada September 2022 menjadi 202,93 ribu orang pada Maret 2023).

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat Rp618.721,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 448.240,- (72,45 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 170.481,- (27,55 persen).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2022-Maret 2023 antara lain adalah:

1. Terjadi pengurangan tenaga kerja di beberapa industri padat karya pada akhir 2022;
2. Inflasi umum periode September 2022-Maret 2023 sebesar 1,05 persen lebih rendah dibandingkan inflasi umum periode Maret 2022-September 2022 sebesar 3,08 persen;
3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2022-triwulan I 2023 turun sebesar 0,87 persen, dibandingkan dengan triwulan I 2022-triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 2,72 persen;
4. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2023 sebesar 102,47 meningkat dibanding September 2022 sebesar 99,97;
5. Pada Februari 2023, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,97 persen. Dimana di daerah perkotaan sebesar 8,06 persen, lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan sebesar 7,73 persen.

Provinsi Banten dalam rangka penurunan kemiskinan telah melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain: 1).Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang, dan jasa semakin meningkat. 2).Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3).Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

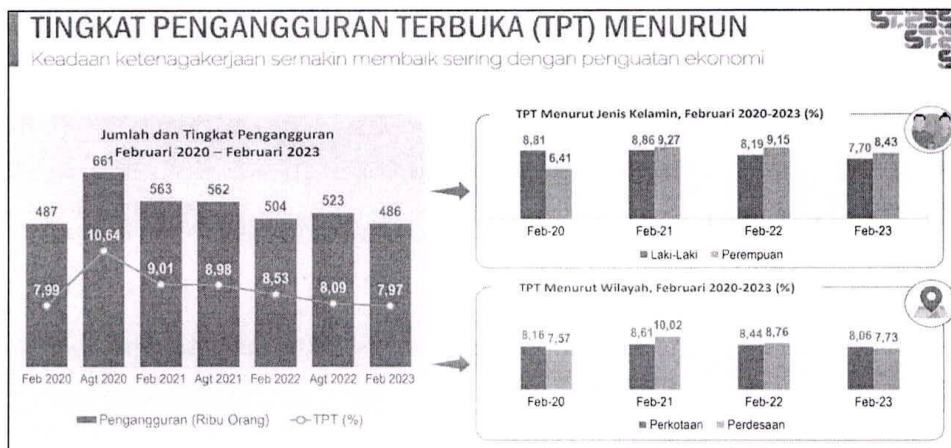
Tabel 2. 3  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,  
Maret 2022 – Maret 2023

No	Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
1	Perkotaan		
	Maret 2022	566,49	5,73
	September 2022	586,21	5,89
	Maret 2023	623,19	6,00
2	Perdesaan		
	Maret 2022	247,54	7,46
	September 2022	243,45	7,29
	Maret 2023	209,93	6,79
Total			
	Maret 2022	814,02	6,16
	September 2022	829,66	6,24
	Maret 2023	826,13	6,17

Sumber: BPS Provinsi Banten

#### D. Tingkat Pengangguran

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Provinsi Banten. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Membaiknya kondisi perekonomian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 212 ribu orang, dan berkurangnya pengangguran sekitar 17,9 ribu orang, jumlah pengangguran pada Februari 2023 sebanyak 486,35 ribu orang atau 7,97%. Dimana TPT tertinggi pada tingkat pendidikan SMA dan TPT terendah pada tingkat pendidikan SD ke bawah. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Februari 2023 memperlihatkan Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 6,1 juta orang, naik 194,1 ribu orang dibanding Februari 2022. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,86 persen poin menjadi 65,94%.



Gambar 2. 4  
Perkembangan Tingkat Pengangguran 2020-2023  
Sumber: BPS Provinsi Banten

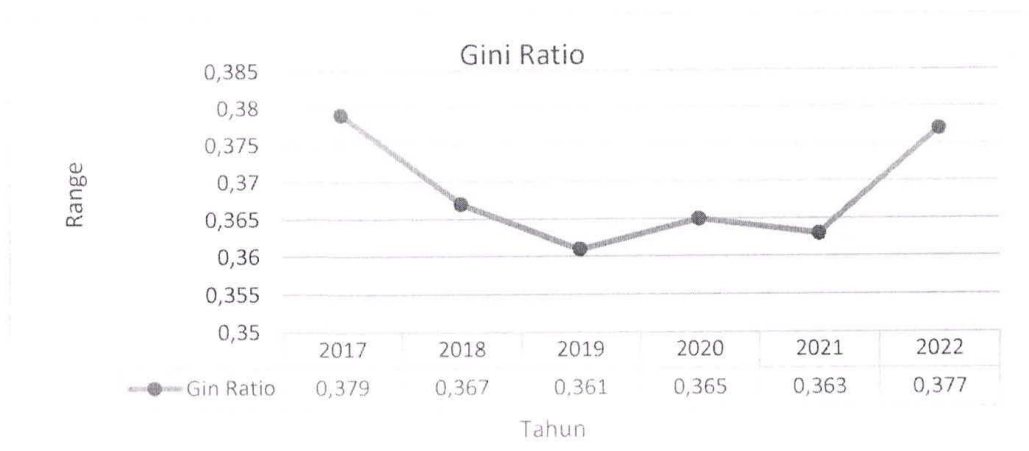


E. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode September Tahun 2022 mencapai sebesar 0,377 poin yang berarti terdapat kenaikan sebesar 0,014 poin dibanding periode Maret 2022 yaitu 0,363 poin, perubahan angka pada satu tahun terakhir. Tercatat bahwa pengeluaran perkapita perbulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2022 mengalami peningkatan 1,49 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun masing-masing sebesar 0,51 poin persen. Dengan adanya kenaikan pengeluaran berpengeluaran tinggi dan penurunan pendapatan dari kelompok pengeluaran rendah maka ketimpangan penduduk periode September ini naik menjadi 0,377.

Berdasarkan target perubahan RKPD perubahan dimana gini ratio ditargetkan 0,370 dan terealisasi 0,377 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,45%.



Gambar 2. 5  
Perkembangan Gini Ratio Tahun 2017-2022  
Sumber: BPS Provinsi Banten

2.1.2. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Banten  
Triwulan II Tahun 2023

Data capaian IKU yang tersedia pada tabel dibawah ini merupakan data terakhir realisasi yang didapat dari BPS, Kementerian, Lembaga yang diterbitkan di tahun 2022 dan 2023. Dari 33 indikator ini ada beberapa realisasi yang telah mencapai target di semester II ini dan ada yang masih berprogress untuk mencapai target di Tahun 2023. Selanjutnya secara rinci realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan akhir Triwulan II/2023 disampaikan sebagai berikut.

Tabel 2. 4  
Capaian IKU Daerah Tahun 2023 (sd TW II)

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	5,58	6,24
			Tingkat Pengangguran Terbuka	8,67	7,97
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	73,27	73,32
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	58,13	52,83
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,665	0,6803
		Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,74	7,71
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,19	65,94
		Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,11	9,13
		dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,75	15

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,40	70,96
			Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,50	20
		Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,07	92,79
		Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	55,03	52,63
			Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,42	48,67
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,44%	4,68
			Indeks Williamson	0,625	0,620
			Indeks Gini	0,363	0,377
		Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,97	5,47
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,99	4,68
			LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	2,44	4,23
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,39	4,34
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,68	3,38
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	tinggi	tinggi

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12,168	12.216
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17	14,48
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,99	63,52
		Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	147,37	144,51
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	66	66,11
		Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,77	67,20
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	82,20	55,89
			Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3	2,5
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,47	3,99
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh

Sumber: hasil olahan Bappeda

Hasil olahan penghitungan sampai dengan triwulan II diperoleh gambaran sementara pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2023, yaitu sebanyak 17 indikator telah mencapai target dan sebanyak 16 indikator berprogress mencapai target.

## 2.2. Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan dan Program

### 2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tw II 2023

Pada capaian kinerja urusan sampai dengan Triwulan II, total indikator sebanyak 92 indikator, dimana ada 13 yang telah mencapai target dan sisanya sebanyak 79 indikator masih berprogres dan belum dapat dihitung pada semester I ini.

Tabel 2. 5  
Capaian Kinerja Urusan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	KET. KINERJA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG PENDIDIKAN					
1	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	93,92	Progress
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	71,34	69,08	Progress
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	63,04	18,11	Progres
4	Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	12,7	7,97	progres
BIDANG KESEHATAN					
5	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	40		
6	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,92	69,61	Progres
7	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	81		
8	Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,7		
9	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100	
BIDANG KEBUDAYAAN					
10	Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,20		
11	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	5		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	KET. KINERJA
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
12	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	40		
13	Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	32,42		
14	Luas Permukiman Kumuh	Ha	277,63		
BIDANG SOSIAL					
15	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	5,40	6,98	Tercapai
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
16	Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	100		
17	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	19,76		
18	Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,87		
19	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	100		
20	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	62,81		
21	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	43,86		
22	Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	94		
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55	0,59	tercapai
24	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100		
25	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
26	a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,18		
27	b. Indeks Kualitas Air (IKA)		54,44		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	KET. KINERJA
28	c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		80,10		
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
29	Angka Kelahiran Total TFR ( <i>Total Fertility Rate</i> ) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	2,38	2,11	
BIDANG PENANAMAN MODAL					
30	Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliun Rupiah	60,00		
31	Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	86,22		
BIDANG KEARSIPAN					
32	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	BB	BB	Tercapai
BIDANG PERSANDIAN					
33	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	273	583	Tercapai
BIDANG PANGAN					
34	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	70,73	73,78	Tercapai
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
35	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,80	91,70	Progress
36	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,25	3,03	Progress
BIDANG TENAGA KERJA					
37	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	68,26	57	Progress
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
38	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,50	0,45	Progress
39	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	50	49	Progress
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
40	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	69,26	69,09	Progress
41	Indek Perlindungan Anak	Nilai	74,55	62,92	progress
BIDANG PERPUSTAKAAN					
42	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13	14,32	Progress
43	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	67,30	65,70	Progress

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	KET. KINERJA
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
44	Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	Progress
BIDANG STATISTIK					
45	Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100	Progress
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
46	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25	16,05	Progress
47	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai kluster	Persen	5	3	Progress
BIDANG PERHUBUNGAN					
48	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,70		
49	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,72	0,70	Progress
50	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	82,00	79,60	Progress
BIDANG PERTANAHAN					
51	Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100		
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
52	Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	14,22	18,98	Progress
53	Persentase Desa Kategori Maju	Persen	13,49	12,86	progres
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
54	Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	55,25	26,08	progres
55	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	5	2,46	Progress
56	Rasio Elektrifikasi	Persen	98,2	99,99	Tercapai
BIDANG KEHUTANAN					
57	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	35,10	39,06	Tercapai
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	KET. KINERJA
58	NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	102	100,19	Progress
59	Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	246.569		
BIDANG PARIWISATA					
60	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	20.060.922	8.483.861	Progress
BIDANG PERDAGANGAN					
61	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,48	33,35	tercapai
BIDANG PERINDUSTRIAN					
62	Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	6,43	13,21	tercapai
BIDANG PERTANIAN					
63	Produksi Peternakan	Ton	225.907		
64	Produksi Hortikultura	Ton	23.714		
65	Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.051.611		
66	Produksi Perkebunan	Ton	50.855		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
67	Indeks Kelembagaan	Nilai	41 - 60		
68	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60		
69	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80,80	64,5	Progress
70	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	67,18	Progress
71	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,05	Progress
72	Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	11,17	Progres
73	Persentase realisasi perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	Persen	100	25,33	Progres
74	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	10	Progress
75	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	48	Progress

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	KET. KINERJA
76	Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100		
77	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/Nilai	4,24	2,70	Progress
SEKRETARIAT DPRD					
78	Tingkat Dukungan dan Fasilitas DPRD	Persen	100		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
79	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1	0	Progress
80	Maturitas SPIP	Nilai	3,14	3,04	Progress
81	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	14	15,30	Tercapai
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEUANGAN					
82	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Tercapai
83	Kemandirian Keuangan	Persen	63,55		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
84	Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif (60.01)	Inovatif (50,41)	Progress
KEPEGAWAIAN					
85	Indeks Merit Sistem	Nilai	321,5	321,5	Tercapai
86	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	24,48	31,29	Tercapai
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
87	Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	10,23		
PERENCANAAN					
88	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori/Nilai	45	41,85	Progress
PENGHUBUNG					
89	Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	4		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
90	Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	77,55	75,93	Progress

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	KET. KINERJA
91	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	100	
	NON URUSAN				
92	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80		

Sumber: Data olahan Bappeda 2023

### 2.2.2. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023

Pada semester I dari Pagu pendapatan sebesar Rp 11.547.460.023.771 terdapat realisasi pendapatan sebesar Rp 5.379.335.291.804 atau tercapai 46,58 persen. Pada belanja dari pagu 11.774.651.290.735 terdapat realisasi belanja Rp 4.476.502.028.519 atau terealisasi sebesar 38,02 persen. Beberapa OPD masih kecil penyerapannya terutama yang menangani pelayanan Dasar, seperti Dinas Perumahan rakyat dan Permukiman, Dinas PUPR dan Dinas Sosial sehingga dengan realisasi yang belum optimal ini memberikan dampak terhadap rendahnya serapan anggaran pada semester I 2023. Adapun kendala pada lelang dan e katalog yang masih belum semua barang tersedia.

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2023 pada triwulan II untuk penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan program prioritas daerah agar diupayakan Perangkat daerahnya untuk fokus pada pencapaian target kinerja dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu. Hasil evaluasi pelaksanaan urusan dan program RKPD Tahun 2023 Provinsi Banten sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2. 6  
Capaian Kinerja Urusan Triwulan II Tahun 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
		S/D Triwulan II	(Rp.)	%
2	3	6	7 = 6 - 3	8
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.544.574.336.460	3.989.274.507.622	4.555.299.828.838	46,69
Pajak Daerah	7.944.849.811.619	3.772.300.314.124	-	47,48
Retribusi Daerah	120.886.373.105	7.314.426.580	-	6,05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67.712.793.358	54.549.889.923	-	80,56
Lain-lain PAD yang Sah	411.125.358.378	155.109.876.995	-	37,73
PENDAPATAN TRANSFER	2.989.040.250.000	1.390.060.784.182	1.598.979.465.818	46,51
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.989.040.250.000	1.390.060.784.182	-	46,51
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.845.437.311	-	13.845.437.311	0
Pendapatan Hibah	13.845.437.311	-	-	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	11.547.460.023.771	5.379.335.291.804	-	46,58
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	6.835.097.862.719	2.492.834.973.399	4.342.262.889.320	36,47
Belanja Pegawai	2.397.488.403.632	956.293.518.414	-	39,89
Belanja Barang dan Jasa	3.807.571.997.487	1.232.002.235.676	-	32,36
Belanja Bunga	1.285.894.000	-	1.285.894.000	0
Belanja Hibah	598.567.367.600	304.539.219.309	-	50,88
Belanja Bantuan Sosial	30.184.200.000	-	30.184.200.000	0
BELANJA MODAL	1.794.289.757.043	105.112.596.593	1.689.177.160.450	5,86
Belanja Modal Tanah	204.135.392.749	478.150.774	-	0,23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.101.967.091	69.947.068.722	-	15,3

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
		S/D Triwulan II	(Rp.)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	640.954.120.722	19.504.262.062	-	3,04
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	455.365.049.471	4.284.374.801	-	0,94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.364.988.110	10.846.440.234	-	29,83
Belanja Modal Aset Lainnya	368.238.900	52.300.000	-	14,2
BELANJA TIDAK TERDUGA	79.042.715.378	350.725.160	-	0,44
Belanja Tidak Terduga	79.042.715.378	350.725.160	-	0,44
BELANJA TRANSFER	3.066.220.955.595	1.878.203.733.367	1.188.017.222.228	61,25
Belanja Bagi Hasil	2.866.940.955.595	1.828.703.733.367	-	63,79
Belanja Bantuan Keuangan	199.280.000.000	49.500.000.000	-	24,84
JUMLAH BELANJA DAERAH	11.774.651.290.735	4.476.502.028.519	-	38,02
SURPLUS / (DEFISIT)	-	227.191.266.964	902.833.263.285	-397,39
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	615.689.000.000	468.942.028.785	146.746.971.215	76,17
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	615.689.000.000	468.942.028.785	-	76,17
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	388.497.733.036	205.790.344.271	-	52,97
Pembentukan Dana Cadangan	250.000.000.000	125.000.000.000	-	50
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.497.733.036	80.790.344.271	-	58,33
PEMBIAYAAN NETTO	227.191.266.964	263.151.684.514	35.960.417.550	115,83
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	1.165.984.947.799	1.165.984.947.799	0

Sumber: BPKAD Provinsi Banten 2023

Tabel 2. 7  
Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II-2023

Urusan / Bidang Urusan / Program			Anggaran	Realisasi	
				Rp	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.106.935.122.088	1.666.246.853.688	27,28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.155.420.581.657	390.943.111.377	33,84
-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		3.117.082.500	1.160.614.750	37,23
-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		543.026.669.853	213.164.147.850	39,25
-	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		77.138.856.700	12.499.637.597	16,20
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		531.302.032.604	163.820.447.180	30,83
-	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		835.940.000	298.264.000	35,68
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			92.190.000.000	32.425.223.110	35,17
-	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		17.463.344.000	4.699.314.853	26,91
-	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		7.775.000.000	456.900.000	5,88
-	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.752.396.000	1.644.122.040	21,21
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		59.199.260.000	25.624.886.217	43,29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.105.636.866.000	123.773.189.194	11,19
-	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		124.880.150.000	5.084.305.893	4,07
-	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		63.750.000.000	9.926.163.809	15,57
-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		450.000.000	-	-
-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		46.070.000.000	711.706.941	1,54
-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		128.756.359.291	20.770.452.192	16,13
-	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		5.435.407.600	708.372.140	13,03
-	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		4.500.000.000	-	-
-	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		2.830.000.000	-	-
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		127.741.779.660	51.740.336.450	40,50

Urusan / Bidang Urusan / Program		Anggaran	Rp	(%)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	597.473.169.449	34.360.576.035	5,75
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.750.000.000	471.275.734	12,57
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.120.447.674.431	1.077.151.935.128	34,52
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	109.520.000.000	25.659.000.000	23,43
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.689.309.853.572	569.018.193.995	33,68
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3.800.000.000	329.600.000	8,67
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	200.000.000	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.317.617.820.859	482.145.141.133	36,59
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.712.000.000	12.144.704.687	2,33
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	80.798.000.000	860.336.800	1,06
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21.500.000.000	444.849.384	2,07
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	500.000.000	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	379.526.950.000	983.979.513	0,26
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.387.050.000	9.855.538.990	25,67
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	112.528.000.000	29.808.690.192	26,49
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.949.750.000	767.389.225	39,36
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.199.863.800	677.690.958	56,48
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.815.389.700	16.876.497.309	36,05
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	53.054.802.500	9.459.398.700	17,83
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.433.194.000	2.027.714.000	21,50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	612.332.377.000	230.026.267.820	37,57
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.264.915.000	800.537.379	35,35

Urusan / Bidang Urusan / Program			Anggaran	Realisasi	
				Rp	(%)
	-	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	750.000.000	154.756.702	20,63
	-	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	850.000.000	501.753.202	59,03
	-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	560.000.000	106.168.256	18,96
	-	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	104.915.000	37.859.219	36,09
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.233.763.000	312.888.983	9,68
	-	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.233.915.000	281.432.983	12,60
	-	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	999.848.000	31.456.000	3,15
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.450.000.000	1.579.380.357	21,20
	-	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.650.000.000	87.527.050	5,30
	-	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.280.000.000	109.173.800	8,53
	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.100.000.000	1.240.477.890	30,26
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	420.000.000	142.201.617	33,86
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	89.008.000.000	38.659.063.336	43,43
	-	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	61.024.245.600	28.061.548.945	45,98
	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.200.000.000	952.224.968	18,31
	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.581.902.250	1.030.460.834	65,14
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.201.852.150	8.614.828.589	40,63
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	65.000.178.900	22.966.472.870	35,33
	-	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28.509.955.389	8.716.884.732	30,57
	-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.686.573.000	5.589.767.200	44,06
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.803.650.511	8.659.820.938	36,38
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	27.394.781.000	10.467.972.419	38,21
	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.310.474.100	491.305.656	37,49



Urusan / Bidang Urusan / Program			Anggaran	Realisasi	
				Rp	(%)
-		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.892.154.000	804.908.811	27,83
-		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	584.160.000	231.435.550	39,62
-		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.499.874.000	1.331.734.541	38,05
-		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.073.763.000	347.249.127	32,34
-		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.034.355.900	7.261.338.734	40,26
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	66.490.552.000	29.064.405.039	43,71
-		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	916.000.000	92.239.400	10,07
-		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	468.000.000	107.348.400	22,94
-		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	384.546.000	-	-
-		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	551.000.000	49.083.900	8,91
-		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.819.445.000	5.723.458.600	73,20
-		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	128.419.200	60.090.000	46,79
-		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.901.057.000	548.243.962	28,84
-		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	735.000.000	331.323.985	45,08
-		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	744.000.000	29.400.000	3,95
-		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.068.584.800	21.979.452.181	42,21
-		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	774.500.000	143.764.611	18,56
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	50.389.000.000	9.450.435.229	18,75
-		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.700.000.000	24.135.000	1,42
-		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	977.000.000	152.575.500	15,62
-		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.320.000.000	32.918.000	2,49
-		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	24.292.579.300	1.382.071.260	5,69

Urusan / Bidang Urusan / Program		Anggaran	Realisasi	
			Rp	(%)
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.099.420.700	7.858.735.469	35,56
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	32.129.000.000	9.845.116.663	30,64
-	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.424.040.000	600.031.300	24,75
-	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	11.630.888.000	2.948.427.000	25,35
-	PROGRAM PENATAAN DESA	500.000.000	96.827.000	19,37
-	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1.535.000.000	57.252.000	3,73
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.039.072.000	6.142.579.363	38,30
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	36.237.885.000	16.372.297.772	45,18
-	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	880.000.000	168.847.930	19,19
-	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	7.548.424.000	3.978.209.373	52,70
-	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	200.000.000	42.249.000	21,12
-	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.494.955.000	1.010.785.513	40,51
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.545.590.000	9.773.300.802	45,36
-	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.251.728.000	310.086.569	24,77
-	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.317.188.000	1.088.818.585	46,99
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	35.549.844.000	12.124.029.977	34,10
-	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.250.000.000	242.550.700	19,40
-	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	350.000.000	151.393.100	43,26
-	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	5.920.000.000	913.587.611	15,43
-	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.774.600.000	458.226.400	25,82
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.477.000.000	9.109.628.366	42,42
-	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	4.778.244.000	1.248.643.800	26,13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.883.400.000	3.108.160.078	45,15

Urusan / Bidang Urusan / Program			Anggaran	Realisasi	
				Rp	(%)
	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.194.400.000	2.550.117.804	49,09
	-	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.124.000.000	504.996.574	44,93
	-	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	565.000.000	53.045.700	9,39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			72.735.000.000	30.955.896.966	42,56
	-	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.580.000.000	275.351.000	17,43
	-	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.050.000.000	280.348.210	26,70
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.355.695.000	16.448.621.509	42,88
	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	31.749.305.000	13.951.576.247	43,94
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			25.762.237.000	9.696.444.909	37,64
	-	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.881.664.300	963.686.289	24,83
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.880.572.700	8.732.758.620	39,91
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			2.750.278.500	255.212.919	9,28
	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.750.278.500	255.212.919	9,28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			500.000.000	-	-
	-	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000	-	-
	-	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	100.000.000	-	-
	-	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	200.000.000	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			1.055.542.600	277.462.200	26,29
	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.055.542.600	277.462.200	26,29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			87.498.000.000	34.090.490.724	38,96
	-	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.567.060.000	1.622.594.025	45,49
	-	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14.996.136.300	4.850.832.300	32,35
	-	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.400.000.000	452.949.000	13,32
	-	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.149.341.000	409.285.000	35,61

Urusan / Bidang Urusan / Program			Anggaran	Realisasi	
				Rp	(%)
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.292.623.700	26.754.830.399	41,61
	-	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	92.839.000	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			423.517.118.000	99.593.121.460	23,52
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44.158.000.000	10.927.174.441	24,75
	-	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	2.340.000.000	83.578.949	3,57
	-	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	606.695.000	15.921.000	2,62
	-	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	17.299.549.000	806.478.230	4,66
	-	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	579.237.000	188.481.530	32,54
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.332.519.000	9.832.714.732	42,14
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	11.169.448.000	2.238.633.667	20,04
	-	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.996.540.000	704.666.600	23,52
	-	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	703.650.000	175.748.000	24,98
	-	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	958.788.000	304.108.220	31,72
	-	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.510.470.000	1.054.110.847	16,19
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	109.162.670.000	19.054.337.777	17,45
	-	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	700.000.000	60.174.000	8,60
	-	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.995.000.000	326.798.700	16,38
	-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	8.937.286.000	155.401.400	1,74
	-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	35.565.006.200	270.660.100	0,76
	-	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.613.405.900	292.779.600	18,15
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.351.971.900	17.948.523.977	29,74
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	49.641.000.000	14.789.948.474	29,79
	-	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.295.355.000	1.355.140.560	25,59

Urusan / Bidang Urusan / Program		Anggaran	Rp	(%)
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.300.000.000	353.801.900	15,38
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.850.000.000	1.124.521.185	29,21
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARWISATA	18.615.355.000	3.845.947.887	20,66
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.580.290.000	8.110.536.942	41,42
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.268.315.600	2.240.299.100	24,17
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.100.000.000	448.763.788	40,80
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	710.000.000	124.648.088	17,56
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	950.000.000	127.863.691	13,46
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	460.000.000	89.057.971	19,36
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	2.200.000.000	666.478.948	30,29
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.848.315.600	783.486.614	20,36
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	81.022.684.400	14.537.254.281	17,94
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	300.000.000	-	-
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	600.000.000	119.697.785	19,95
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.862.291.400	13.248.984.018	17,94
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.260.393.000	1.168.572.478	18,67
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	119.095.000.000	35.805.473.720	30,06
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.100.000.000	206.520.600	18,77
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.373.542.000	902.770.874	26,76
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.635.086.500	27.136.892.905	40,72
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.073.562.600	430.734.700	5,34
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	32.295.008.900	4.473.946.341	13,85
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.367.800.000	2.597.758.300	35,26

Urusan / Bidang Urusan / Program			Anggaran	Realisasi	
				Rp	(%)
	-	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000	56.850.000	22,74
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			106.425.621.000	68.357.329.661	64,23
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	106.425.621.000	68.357.329.661	64,23
	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.560.000.000	366.218.220	23,48
	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.923.996.300	1.626.166.826	55,61
	-	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	6.212.583.055	654.970.000	10,54
	-	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	35.621.423.828	29.993.500.532	84,20
	-	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	38.172.070.000	28.436.709.000	74,50
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.935.547.817	7.279.765.083	33,19
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			748.705.000.000	300.364.572.888	40,12
		SEKRETARIAT DAERAH	259.793.000.000	95.948.946.106	36,93
	-	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.265.727.200	863.010.200	26,43
	-	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.000.000.000	55.510.990	5,55
	-	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.950.224.285	738.903.079	37,89
	-	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.480.000.000	12.296.428.028	63,12
	-	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.350.000.000	727.490.695	21,72
	-	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.819.183.000	577.470.928	20,48
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	226.736.795.264	80.535.904.436	35,52
	-	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.191.070.251	154.227.750	12,95
		SEKRETARIAT DPRD	488.912.000.000	204.415.626.782	41,81
	-	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	248.784.775.000	111.027.360.470	44,63
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	240.127.225.000	93.388.266.312	38,89

Urusan / Bidang Urusan / Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	(%)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	71.643.000.000	26.980.426.136	37,66
INSPEKTORAT DAERAH	71.643.000.000	26.980.426.136	37,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.868.778.000	26.114.087.586	41,54
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.789.982.000	817.138.550	10,49
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	984.240.000	49.200.000	5,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.705.093.052.647	2.084.919.144.167	56,27
KEPEGAWAIAN	65.584.000.000	19.166.379.140	29,22
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.746.607.800	3.855.737.435	39,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.837.392.200	15.310.641.705	27,42
KEUANGAN	3.517.812.052.647	2.022.453.304.082	57,49
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11.094.129.000	848.446.325	7,65
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.156.650.622.973	1.879.576.369.882	59,54
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	23.068.622.652	4.838.432.025	20,97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	326.998.678.022	137.190.055.850	41,95
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	53.982.000.000	19.180.463.051	35,53
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.842.919.400	4.347.229.438	21,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.139.080.600	14.833.233.613	43,45
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.550.000.000	750.828.225	21,15
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.550.000.000	750.828.225	21,15
PENGELAAN PENGHUBUNG	13.254.000.000	4.082.925.898	30,81
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.583.391.830	542.663.514	15,14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.670.608.170	3.540.262.384	36,61
PERENCANAAN	50.911.000.000	19.285.243.771	37,88

Urusan / Bidang Urusan / Program			Anggaran	Realisasi	
				Rp	(%)
	-	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.431.516.300	543.974.803	22,37
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.079.483.800	16.821.503.708	41,97
	-	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	8.399.999.900	1.919.765.260	22,85
Grand Total			11.774.651.290.735	4.476.487.715.821	38,02

Sumber: BPKAD 2023



## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

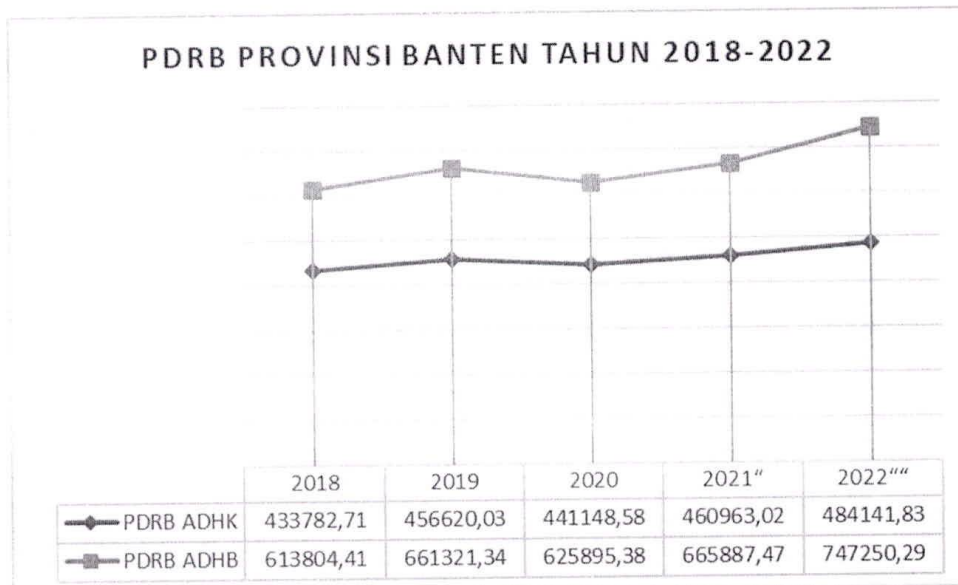
#### 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2018-2022

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2023 sesuai dengan RPD 2023-2026 adalah dalam rangka pemantapan daya saing perekonomian dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

#### 3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB Provinsi Banten menggambarkan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi setiap tahunnya. Dari gambar 3.1 terlihat bahwa PDRB Banten cukup besar di angka 747.250,29 miliar pada Tahun 2022 atau meningkat 81.362,82 miliar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB Banten setiap tahunnya menggambarkan baiknya pertumbuhan ekonomi Banten yang disumbangkan oleh berbagai sektor yang ada di Provinsi Banten.

PDRB digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa, bahan analisis produktivitas secara sektoral serta alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dari angka PDRB kita bisa melihat bahwa ekonomi Banten selalu tumbuh bahkan pertumbuhannya cukup akseleratif salah satu tandanya adalah pertumbuhan ekonomi Banten selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya Banten merupakan Provinsi yang mampu tumbuh dengan baik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang mungkin saja perlu usaha lebih agar ekonominya tumbuh.



**Gambar 3. 1**

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Banten Tahun 2018-2022  
(SIPD Provinsi Banten, 2023)

Perhitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010.

Dalam menghitung PDRB, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan berbeda. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Tabel 3.1 PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (LU) merupakan perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa dari sisi produksi yang terdiri dari 17 LU, industri pengolahan merupakan LU dengan PDRB terbesar di Provinsi Banten.

Maka tidak salah jika Provinsi Banten dikatakan sebagai provinsi industri karena proporsi terbesar PDRB berasal dari industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, real estate, dan transportasi. LU pertanian baru mampu duduk di peringkat 6 penyumbang PDRB Provinsi Banten salah satu penyebabnya adalah masih terlalu pendeknya rantai pasok LU pertanian sehingga nilai tambah yang dihasilkan lebih rendah daripada nilai tambah potensial yang sebenarnya dimiliki.

Tabel 3. 1  
PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (LU) di Provinsi Banten (miliar rupiah), Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha/ Industry	2018	2019	2020	2021	2022
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	191862,88	203249,81	195331,62	209815,06	227675,91
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycle</i>	76660,79	84199,74	83240,61	85898,99	93547,29
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	65452,94	73327,25	71551,76	82113,95	91202,80
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	67325,20	71188,56	40458,22	41693,88	71165,36
L Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	46579,27	52186,16	54258,20	56397,21	60289,40
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	35573,82	37018,35	38998,27	40199,75	44050,68
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	21695,57	23278,14	25200,74	26574,75	28218,24
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	18929,68	19713,72	20300,42	22323,34	25307,29
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	21129,74	23716,27	24495,93	24346,20	24581,06
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	14632,81	15852,96	15154,34	15890,83	17447,46
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	12301,12	13657,22	14210,48	14457,87	15227,22
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	12770,04	12035,57	10504,20	12140,42	13016,30
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	10018,08	11149,97	10861,69	11163,47	12163,45
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities	7444,37	8369,18	9183,12	10298,33	10687,98
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6674,14	7492,68	7325,21	7329,42	7914,75
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4272,13	4375,91	4269,64	4658,86	4142,44
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	481,83	509,83	550,95	585,16	612,68
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	613804,41	661321,34	625895,38	665887,47	747250,29

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2023

Dilihat lebih dalam ke sektor industri pengolahan, maka dari tabel di bawah bisa dilihat bahwa sektor industri di Banten terutama berasal dari Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional. Pada tahun 2017, Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik masih setara dengan industri kimia, tetapi pada Tahun 2021, industri kimia sudah jauh melesat meninggalkan industri barang logam. Angka ini menunjukkan bahwa ke depan Provinsi Banten bisa menyiapkan lebih banyak daya dukung terhadap industri kimia yang pertumbuhannya luar biasa.

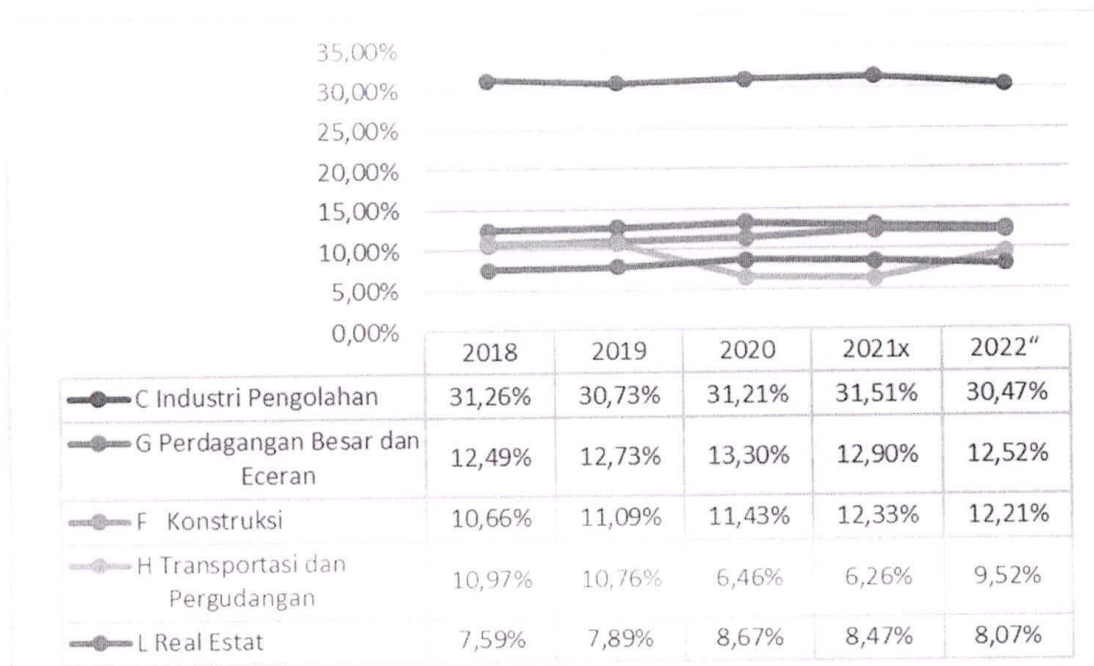
Tabel 3. 2  
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
 Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan di Provinsi Banten (miliar  
 rupiah), Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/ Industry	2018	2019	2020	2021	2022
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	149425,06	154760,72	147538,56	155027,99	160615,99
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycle</i>	58614,23	62297,07	60481,98	61595,34	64030,67
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	42363,00	46048,00	44727,31	49561,84	51954,77
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	37260,63	40521,47	41391,71	42634,90	44509,24
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	24998,29	27244,33	29735,82	31371,53	33161,90
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	29068,52	29256,38	20871,02	22064,04	27949,96
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	23880,77	24408,33	25275,08	25416,58	26485,81
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	12873,62	13134,12	13491,85	14243,52	14912,06
PJasa Pendidikan/ <i>Education</i>	13103,71	14111,91	14299,37	14140,83	13992,86
IPenyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	10664,40	11449,00	10865,79	11333,21	12249,58
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7517,97	8109,26	8056,83	7990,33	8129,36
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6535,99	7102,43	6716,94	6812,51	7198,00
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5249,40	5698,34	6125,81	6735,46	6857,86
M,NJasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4458,98	4841,09	4627,21	4565,19	4732,95
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4480,41	4317,96	3832,07	4318,93	4639,69
B Pertambangan dan Penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	2871,46	2881,66	2640,63	2656,62	2208,48
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	416,27	437,98	470,59	494,19	512,65
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	433782,71	456620,03	441148,58	460963,02	484141,83

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada Gambar 3.2 menunjukkan bahwa dominasi sektor industri pengolahan di Provinsi Banten belum tergoyahkan dalam hal kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Banten. Bahkan sektor transportasi dan pergudangan kontribusinya menurun dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini sebenarnya memiliki potensi negatif karena ekonomi Banten bisa dikatakan terlalu bergantung pada sektor industri pengolahan. Jika industri pengolahan mengalami hal yang tidak diinginkan, maka dampaknya akan sangat terasa bagi perekonomian Banten. Sehingga perlu

upaya dari pemerintah Provinsi Banten agar terjadi diversifikasi kontributor lapangan usaha di Provinsi Banten sehingga jika terjadi hal yang buruk terhadap sektor industri, sektor lainnya bisa membackup perekonomian Banten.

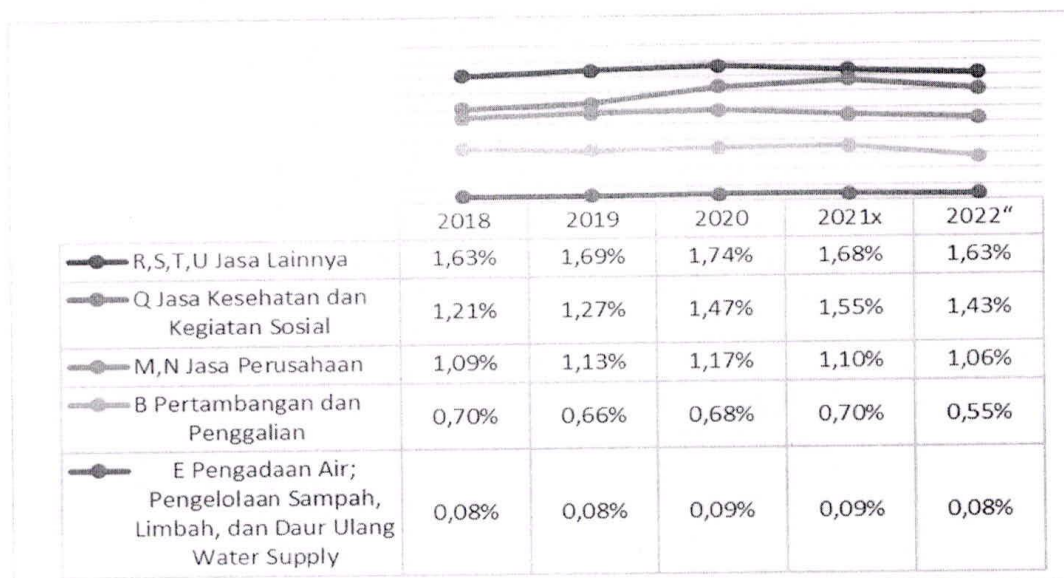


Gambar 3.2

Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten Tahun 2018-2022

(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

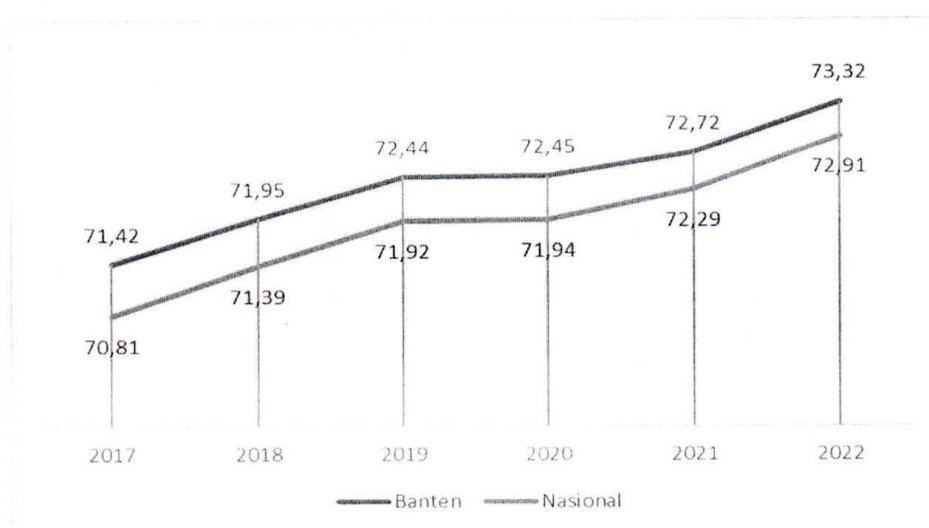
Sektor yang memiliki kontribusi terendah bagi perekonomian Banten adalah sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Padahal pada tingkat nasional, terdapat gerakan ekonomi sirkular yang bisa jadi meningkatkan kontribusi sektor ini. Penerapan ekonomi sirkular mencakup pengelolaan sumber daya alam pada lima sektor prioritas (Elektronik, Makanan dan Minuman, Tekstil, Konstruksi, dan Retail), yang berfokus pada kemasan plastik) berpotensi meningkatkan PDB pada kisaran Rp 593 triliun hingga Rp 638 triliun, menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton CO<sub>2</sub> ekuivalen pada tahun 2030.



Gambar 3. 3  
 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten  
 Tahun 2018-2022  
 (Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

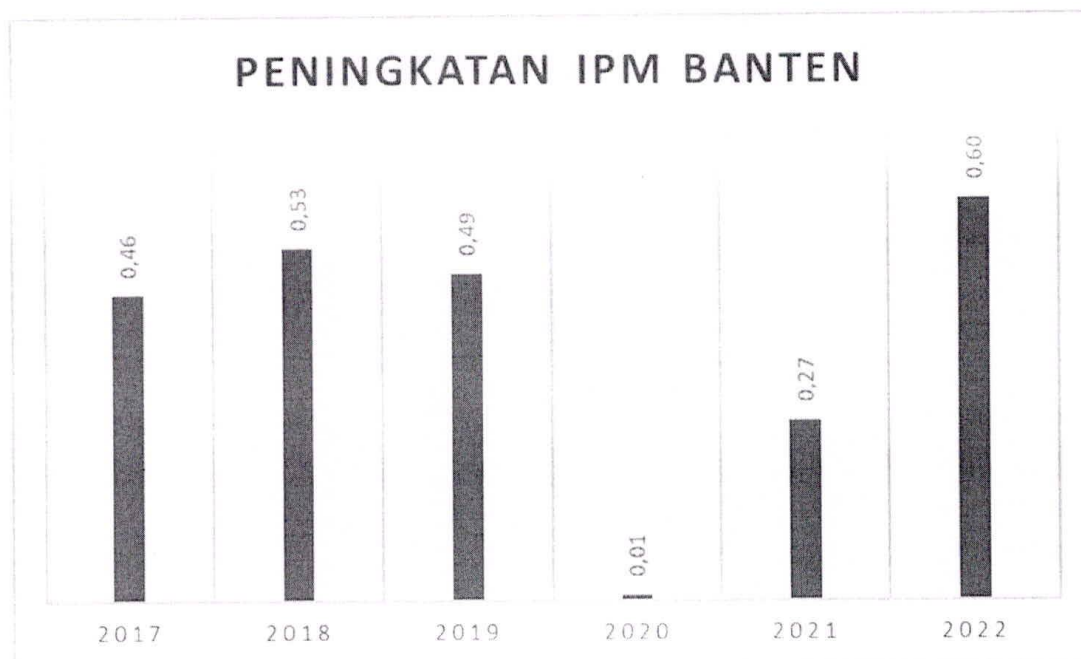
### 3.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM Banten secara umum dalam beberapa tahun terakhir selalu meningkat yang artinya terjadi peningkatan kualitas hidup di Provinsi Banten dan mengindikasikan adanya perbaikan capaian pembangunan manusia.



Gambar 3. 4  
 IPM Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2017-2022  
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

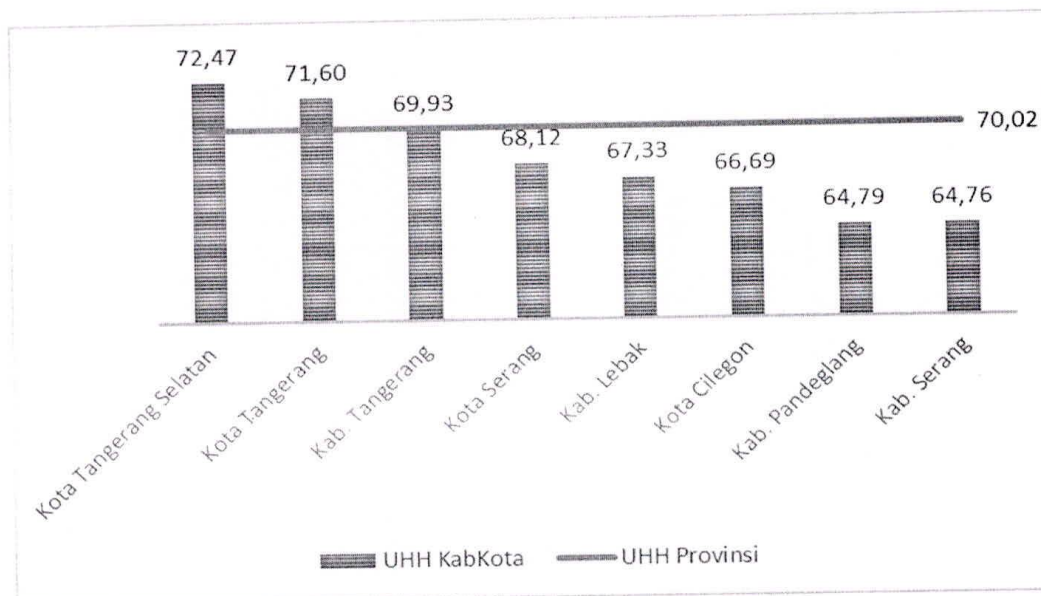
Akan tetapi, peningkatan IPM di Provinsi Banten tidak begitu akseleratif karena dari tahun ke tahunnya hanya tumbuh di bawah satu poin, bahkan pada tahun 2020 tercatat hanya meningkat 0,01 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pengungkit dalam hal peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Banten sehingga kualitas hidup masyarakat Banten dapat meningkat. IPM Provinsi Banten juga belum mampu menembus kategori sangat tinggi.



Gambar 3. 5  
 Peningkatan Nilai IPM Provinsi Banten Tahun 2017-2022  
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

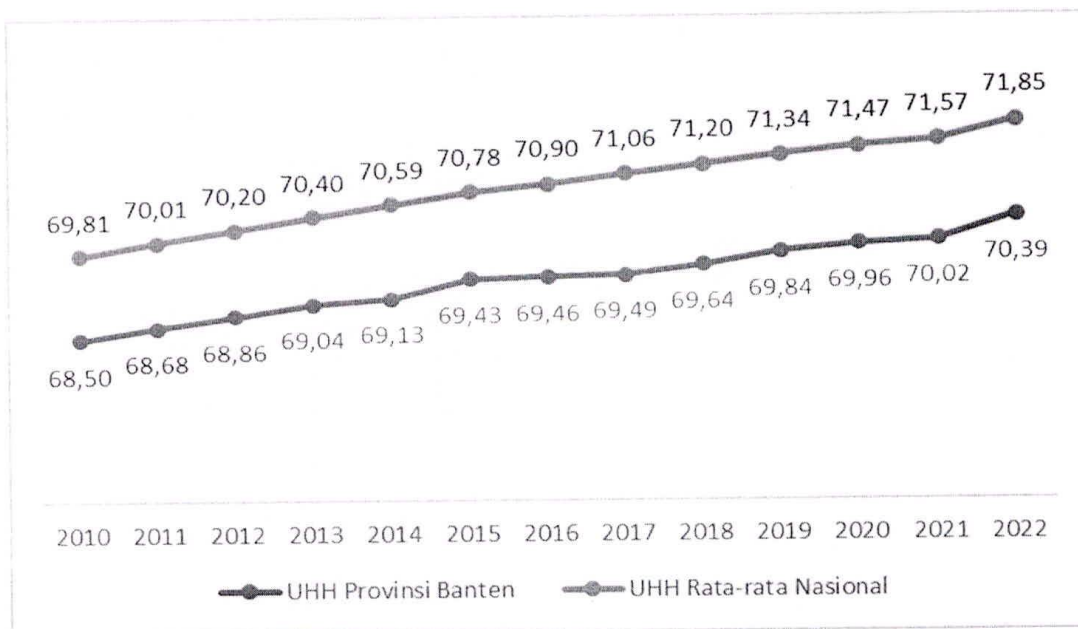
**A. IPM Aspek Kesehatan**

IPM aspek kesehatan dapat dilihat dari angka Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH di Provinsi Banten pada Tahun 2022 adalah 70,39 yang artinya bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup hingga 70,30 Tahun.



Gambar 3. 6  
 UHH Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2022  
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

UHH di Provinsi Banten dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan yang artinya terjadi perbaikan terutama di aspek kesehatan sehingga bayi yang baru lahir memiliki peluang bertahan hidup semakin panjang. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan UHH rata-rata nasional yang mencapai angka 71,85 tahun, maka Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan kerja ekstra agar bayi yang baru lahir di Provinsi Banten setidaknya memiliki peluang bertahan hidup di atas rata-rata nasional.



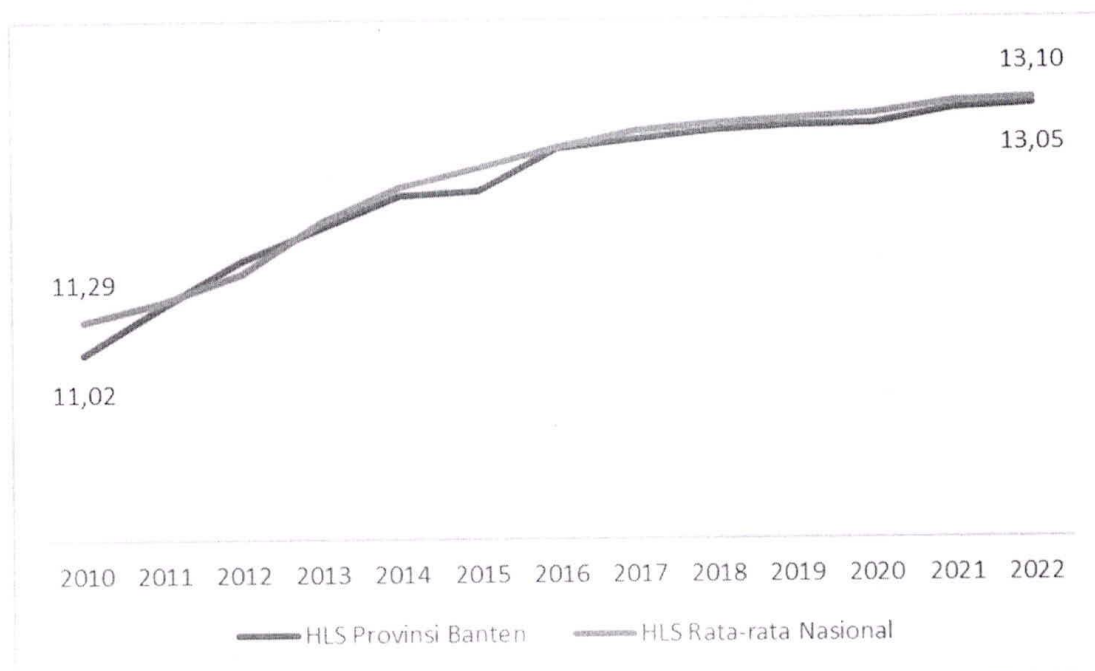
Gambar 3. 7  
 Perbandingan UHH Provinsi Banten dan Rata-rata Nasional  
 Tahun 2010-2022  
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)



**B. IPM Aspek Pendidikan**

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Banten pada tahun 2022 sebesar 13,05 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,05 tahun atau setara dengan Diploma I.

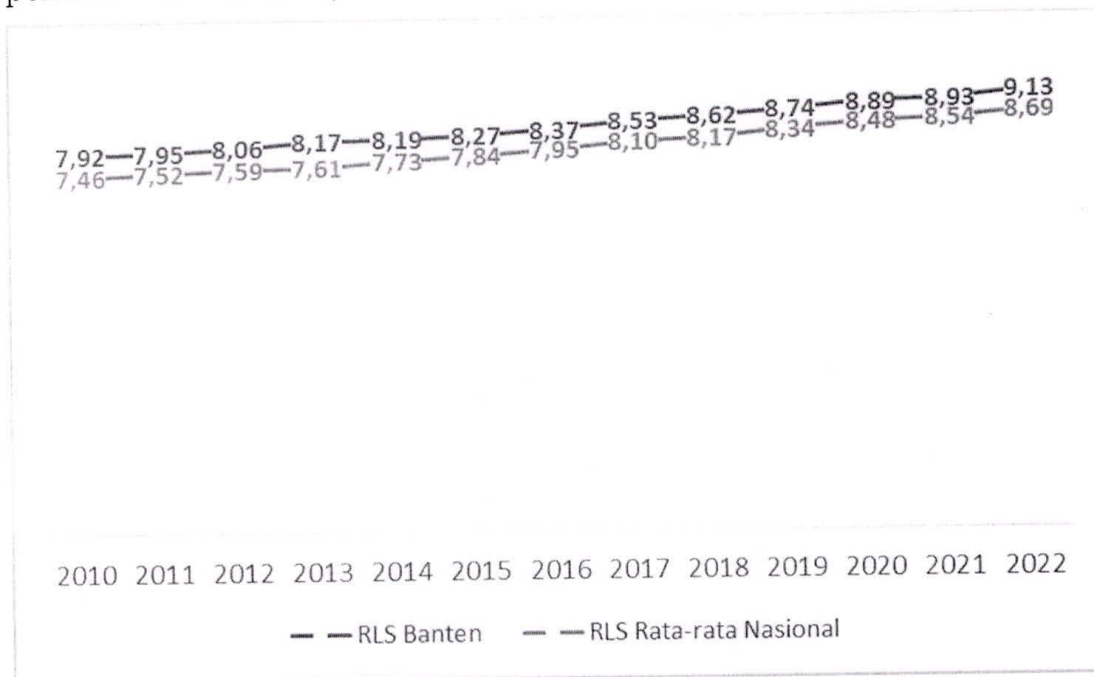


Gambar 3. 8  
HLS Provinsi Banten dan HLS Rata-rata Nasional Tahun 2010-2022  
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS

Banten pada tahun 2022 sebesar 9,13 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Banten yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,13 tahun atau hampir menamatkan kelas X.

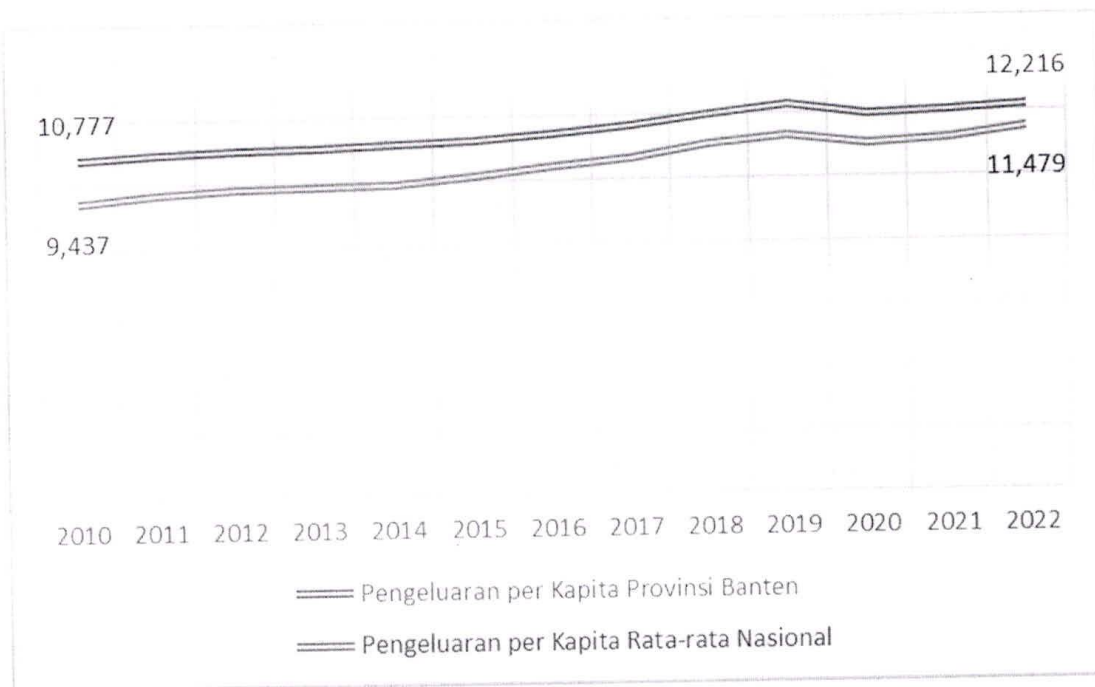


Gambar 3. 9  
RLS Provinsi Banten dan Rata-rata Nasional Tahun 2010-2022  
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

### C. IPM Aspek Pengeluaran

IPM aspek pengeluaran dilihat dari Pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada Kota Jakarta Selatan, sementara tahun rujukan adalah 2012.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.



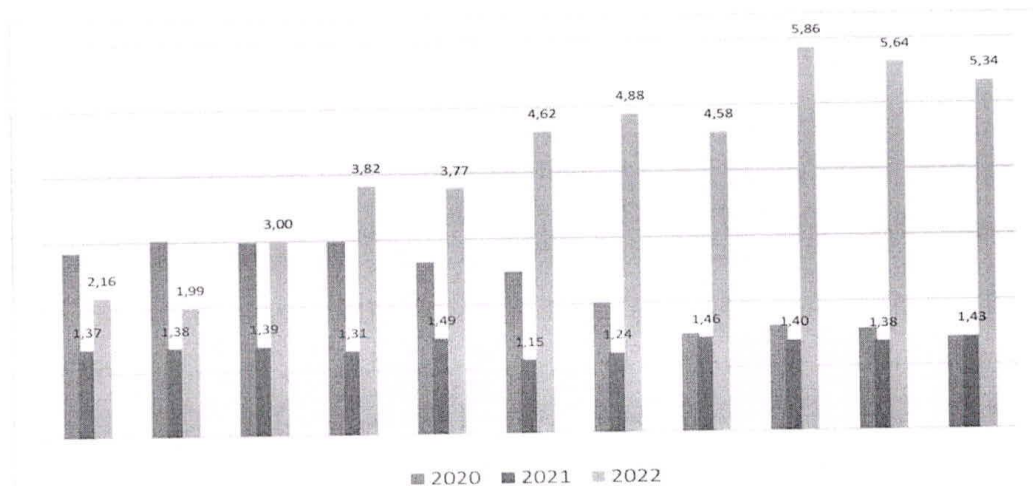
Gambar 3. 10  
 Pengeluaran Per Kapita Provinsi Banten dan Nasional  
 Tahun 2010-2022  
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita Banten pada tahun 2022 sebesar Rp 12.216.000 artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Banten selama setahun adalah Rp 12.216.000.

- Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi yang rendah terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak Pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan antar lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Inflasi yang terjaga

adalah di kisaran 3-4%. Dalam beberapa bulan terakhir di Tahun 2022, inflasi Banten sudah melewati angka 4%. Hal ini menjadi alarm agar Pemerintah Provinsi Banten segera melakukan langkah-langkah untuk menekan laju inflasi agar tidak jauh melebihi 4%. Di beberapa Provinsi lain di Indonesia, inflasi sudah jauh melewati angka 4% yang menandakan bahwa sejauh ini inflasi di Provinsi Banten relatif terjaga.

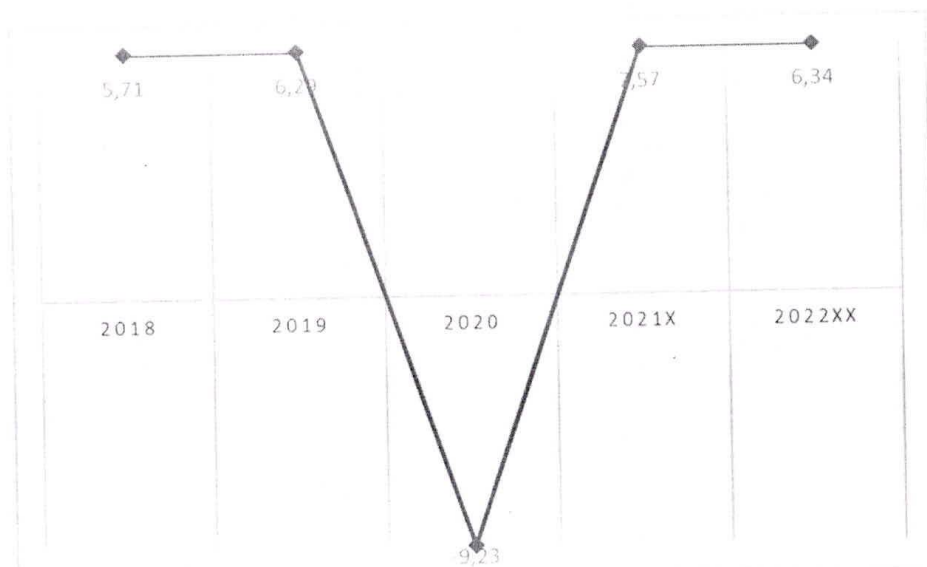


Gambar 3.11  
Inflasi Bulan Januari-November Tahun 2020-2022  
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

#### 3.1.4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Semakin kecil nilai koefisien ICOR, semakin efisien perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu.

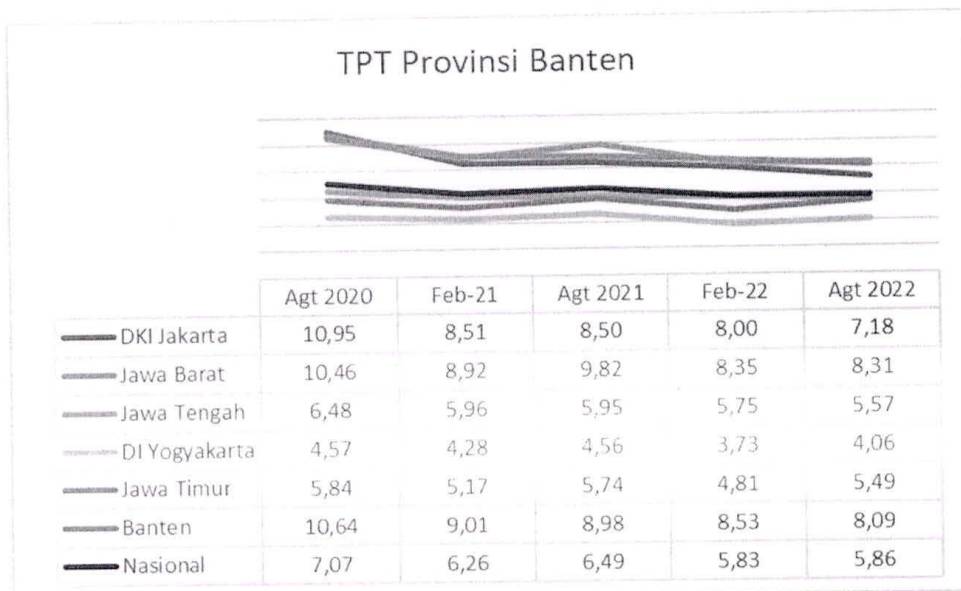
Dari gambar dapat dilihat bahwa secara umum, dalam lima tahun terakhir, ICOR Banten memiliki kecenderungan terus meningkat. Ada sejumlah faktor yang menjadi pemicu tingginya ICOR, antara lain rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tingginya biaya logistik, reformasi birokrasi berjalan belum optimal. Pada tahun 2020, ICOR Banten negatif terjadi karena output pada tahun 2020 lebih kecil dari pada tahun sebelumnya.



Gambar 3. 12  
Perkembangan ICOR Banten, 2017-2021  
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

### 3.1.5. Ketenagakerjaan

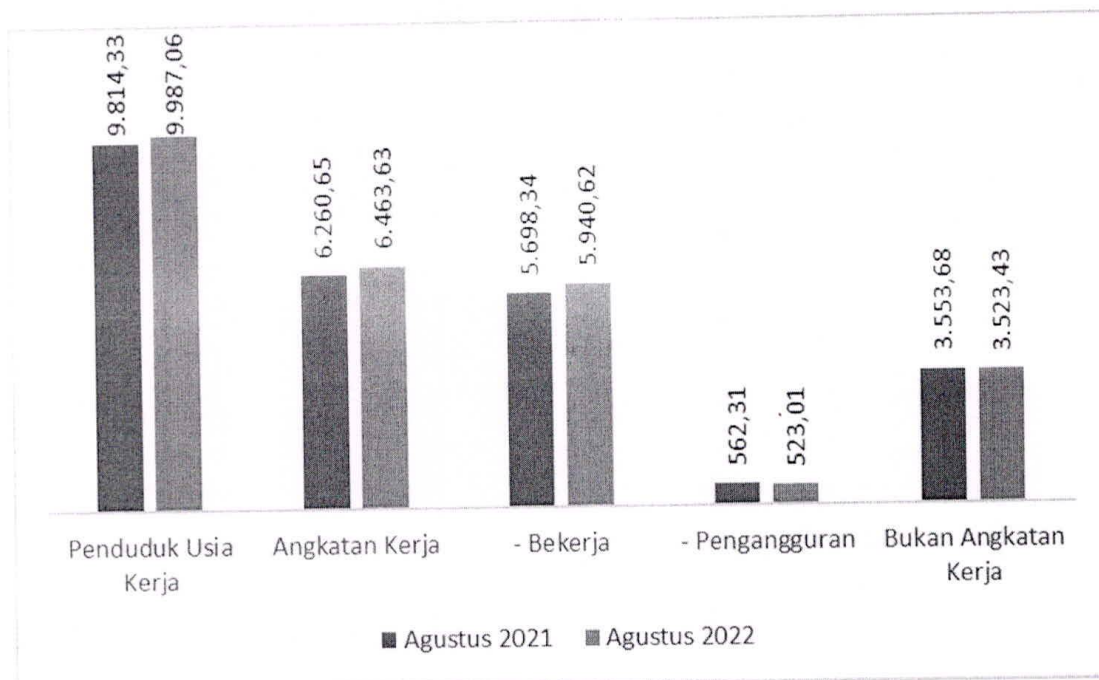
Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja di Provinsi Banten pada Agustus 2022 adalah sebanyak 9.987.060 orang atau meningkat 172.730 orang dibandingkan setahun yang lalu. Peningkatan penduduk usia kerja ini adalah sebuah sinyal positif bahwa penduduk usia produktif di Provinsi Banten terus bertambah guna mendorong kebutuhan tenaga kerja di Provinsi Banten. Dari 9 juta orang yang termasuk ke dalam penduduk usia kerja, terbagi lagi ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.



Gambar 3. 13  
Perkembangan TPT Provinsi Banten Dibandingkan dengan TPT di Pulau Jawa  
dan TPT Rata-rata Nasional, Agustus 2020-Agustus 2022  
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Angkatan kerja di Provinsi Banten pada Agustus 2022 adalah sebanyak 6.463.630 orang atau meningkat 202.980 orang dibandingkan tahun lalu. Peningkatan yang luar biasa ini di satu sisi merupakan hal positif karena tersedianya tenaga kerja guna salah satu faktor produksi dalam kegiatan perekonomian. Akan tetapi, di sisi lain, peningkatan ini juga memunculkan tantangan apakah pasar lapangan kerja siap untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Sejauh ini pertumbuhan angkatan kerja tersebut masih tertangani salah satunya tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja dan di saat yang bersamaan berkurangnya penduduk yang menganggur.

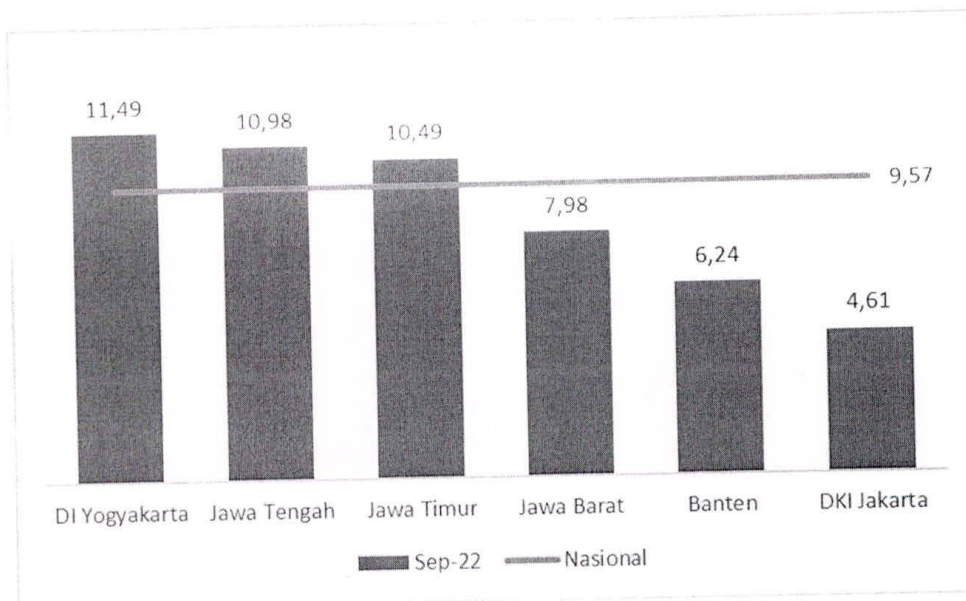
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk Banten yang bekerja pada Agustus 2022 adalah sebanyak 5.940.620 orang atau bertambah 242.270 orang, sedangkan penduduk Banten yang menganggur adalah sebanyak 523.010 orang atau berkurang sebanyak 39.300 orang.



Gambar 3.14  
 Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bekerja, Pengangguran, dan Bukan Angkatan Kerja di Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022  
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

### 3.1.6. Kemiskinan

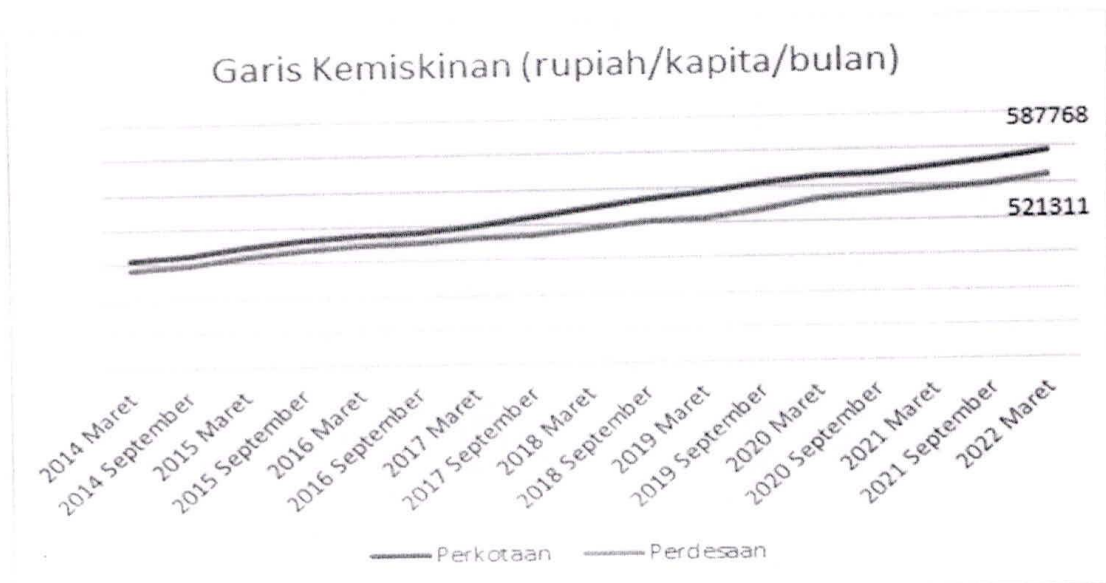
Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



Gambar 3.15  
 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Banten dibandingkan dengan Provinsi di  
 Pulau Jawa dan Rata-rata Nasional Tahun 2022  
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

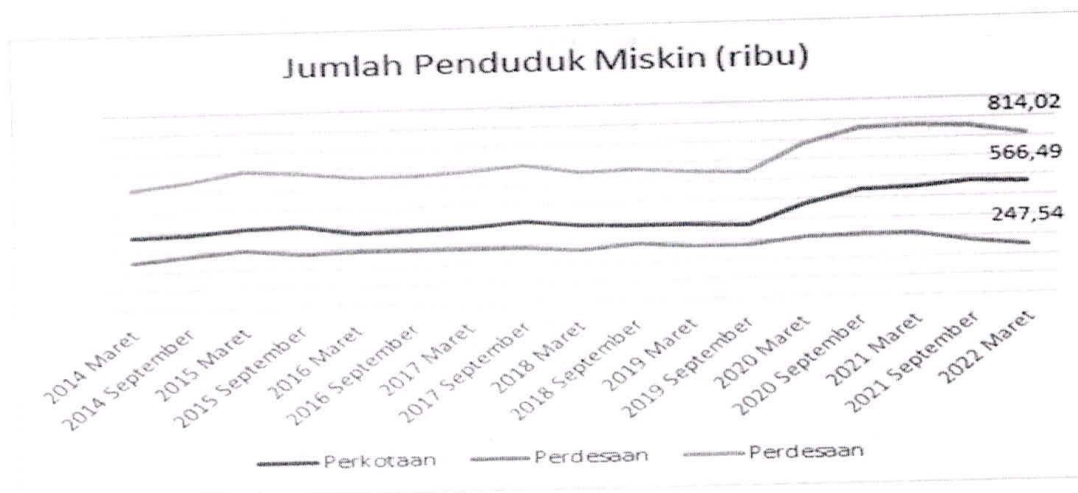
Gambar 3.14 menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu GK terus meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan baik makanan atau non makanan. Usaha untuk menekan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin juga mendapatkan tantangan yang cukup berat karena harus berusaha untuk menaikkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang terus meningkat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjaga agar penduduk yang hanya berada sedikit di atas GK untuk tidak jatuh ke bawah GK. Gambar 3.14 juga memperlihatkan bahwa jarak GK antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan semakin menjauh. Hal ini terutama disebabkan karena biaya non makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Biaya-biaya tersebut misalnya perbedaan harga perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya di perkotaan dengan perdesaan yang cukup signifikan.





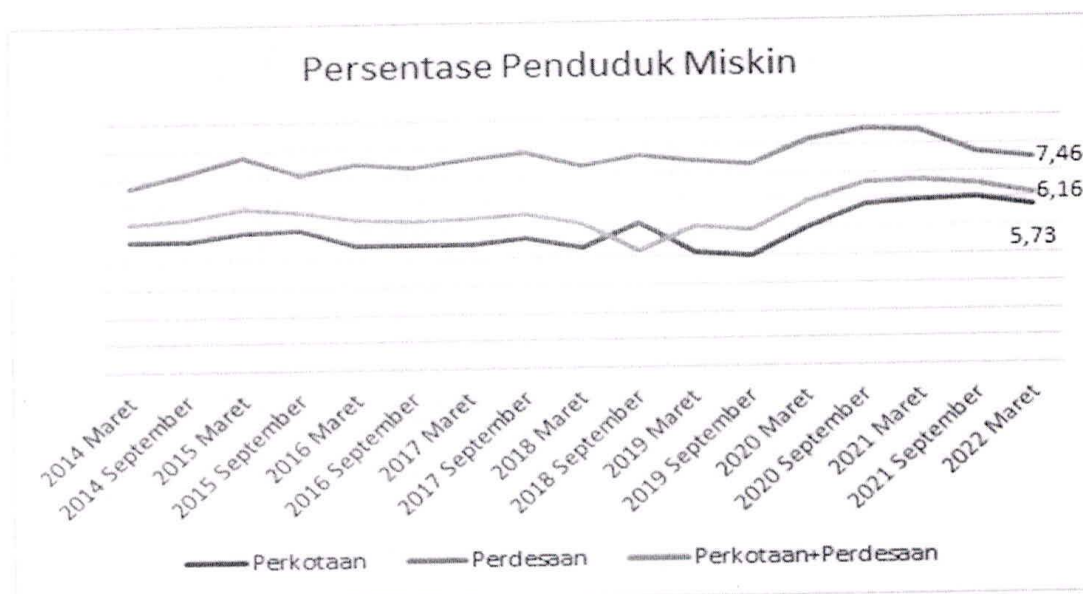
Gambar 3.16  
 Garis Kemiskinan dan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Banten Tahun 2014-2021  
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Provinsi Banten memiliki tantangan yang cukup berat karena berdasarkan data pada gambar 3.15 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin sejak September 2019 mengalami peningkatan yang luar biasa di mana sebelum September 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten masih di angka 600-an ribu sedangkan dari September 2019 hingga sekarang, jumlah penduduk miskin sudah mencapai angka 852 ribu. Peningkatan yang luar biasa ini diperparah dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang memiliki dampak negatif ke berbagai sektor di Provinsi Banten. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten terutama disumbangkan oleh penduduk miskin yang tinggal di perkotaan. Di saat jumlah penduduk miskin di perdesaan memiliki tren positif, jumlah penduduk di perkotaan malah sebaliknya.



Gambar 3.17  
 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2014-2022  
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

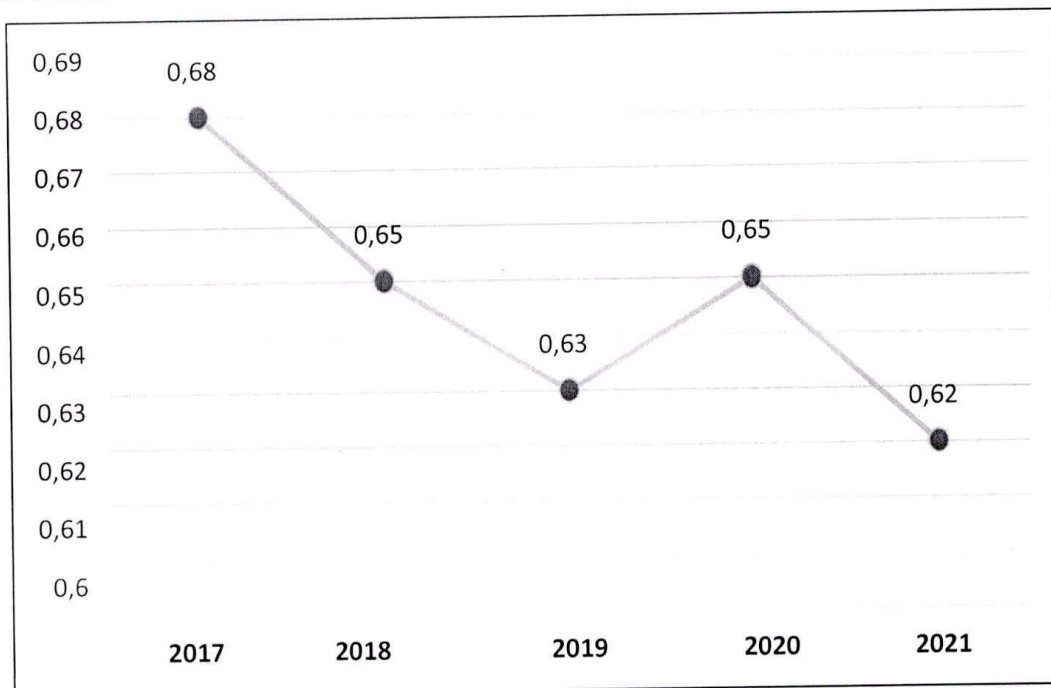
Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kegunaan angka ini adalah untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Dilihat dari gambar 3.16, persentase kemiskinan Provinsi Banten juga sedang di angka yang tidak terlalu menggembirakan karena berada di angka 6% di mana di tahun-tahun sebelumnya berada di angka 5%. Ada yang menarik terkait dengan angka kemiskinan di Provinsi Banten di mana jika melihat angka penduduk miskin, maka yang terbanyak adalah di perkotaan, tetapi jika melihat angka persentase, maka angka tertinggi ada di perdesaan.



Gambar 3.18  
 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2022  
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

### 3.1.7. Ketimpangan Regional

Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah. Indeks Williamson berkisar antara  $0 < IW < 1$ , di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Dalam penghitungan ini, ketimpangan dilihat berdasarkan perbandingan PDRB sebagai *proxy* produksi yang dihasilkan suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Angka Indeks Williamson dalam lima tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun yang artinya ketimpangan berkurang dari tahun ke tahunnya walaupun memang belum begitu signifikan. Pada tahun 2020 angka Indeks Williamson bahkan sempat meningkat akibat dari dampak Pandemi Covid-19.



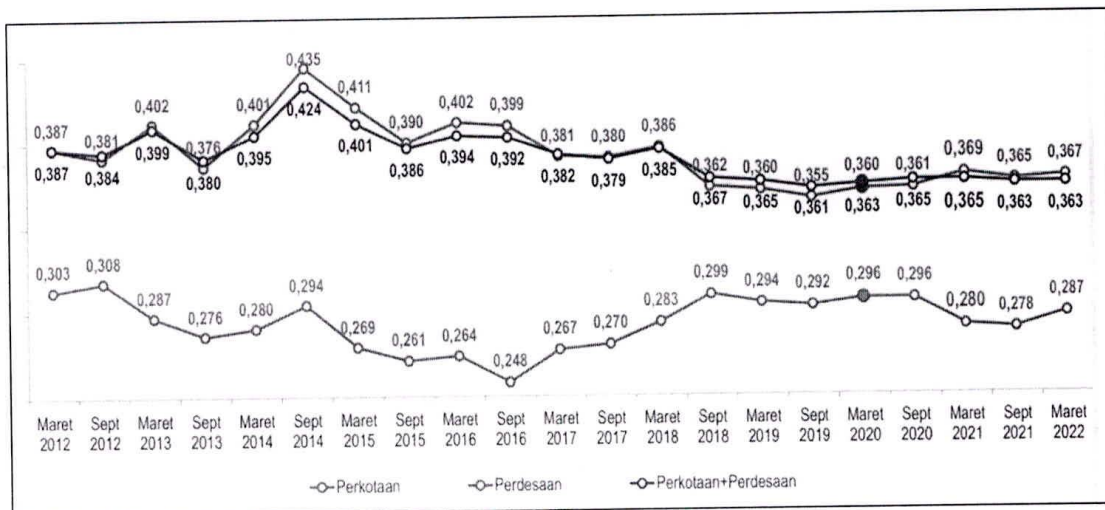
Gambar 3.19  
Indeks Williamson Tahun 2017-2021  
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Mulai beroperasinya jalan Tol Serang-Panimbang seksi 1 yakni Serang-Rangkasbitung serta mulai dibangunnya seksi 2 (Rangkasbitung-Cileles) diharapkan mampu menumbuhkan minat investor menanamkan modalnya untuk membuka usaha ekonomi di wilayah Rangkasbitung dan Pandeglang. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi di kedua wilayah tersebut, diharapkan kontribusi PDRB meningkat sehingga dapat menurunkan indeks williamson di Provinsi Banten.

### 3.1.8. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks atau rasio ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Rasio Gini Provinsi Banten yang digambarkan dengan garis merah menunjukkan stagnansi dalam beberapa tahun terakhir di mana rasio gini Provinsi Banten berkisar antara 0,35-0,36. hal ini mengindikasikan bahwa perlu program kegiatan yang lebih kuat dalam menekan angka rasio gini sehingga dalam beberapa tahun ke depan, rasio gini bisa turun secara lebih signifikan. Jika dilihat perbedaan antara rasio gini di perkotaan dan perdesaan, maka bisa dilihat bahwa ketimpangan terjadi lebih besar di perkotaan sehingga program kegiatan untuk menekan angka ketimpangan bisa difokuskan di daerah perkotaan.



Gambar 3.20  
Rasio Gini Provinsi Banten Tahun 2012-2022  
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Penanganan Pandemi Covid-19 serta cakupan vaksinasi yang tinggi terbukti mampu mengendalikan pandemi covid-19 baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan berangsur membaiknya kondisi perekonomian,

diharapkan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat dapat terwujud.

### 3.1.9. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 pada P-RKPD Tahun 2023

Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diturunkan batas bawah/pesimisnya di angka 4,70-5,20 dimana sebelumnya di angka 5,02-5,15. Hal ini sejalan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional atau IMF yang memprediksi LPE nasional Tahun 2023 yang lebih rendah atau terjadi perlambatan jika dibandingkan dengan LPE pada tahun 2022. Bahkan untuk Provinsi Banten perlambatan bisa lebih buruk mengingat Provinsi Banten tidak mendapatkan keuntungan dari hadirnya “booming” harga komoditas karena Banten bukan penghasil komoditas seperti Kalimantan misalnya. Range nya puna semakin melebar karena kondisi ketidakpastian global semakin meningkat. Bahkan proyeksi LPE rata-rata dunia hanya 2,8% saja akibat dari tidak pastinya kondisi ekonomi dunia.

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih optimis berdasarkan capaian Tahun 2022 yang cukup positif di angka 8,09. Oleh karena itu TPT diproyeksikan turun ke angka 7,9 ditopang oleh daya serap tenaga kerja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu usaha nyata adalah hadirnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata ke Indonesia (BBWI).

Proyeksi Persentase Penduduk Miskin dinaikkan berdasarkan capaian Tahun 2022 yang tidak terlalu menggembarakan di mana persentase penduduk miskin hanya mencapai angka 6,16% sehingga proyeksi disesuaikan menjadi 6,10%. Hal ini sejalan dengan adanya *scarring effect* pasca Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor terutama daya beli masyarakat. Selain itu, tingginya inflasi dalam beberapa tahun terakhir menekan daya beli masyarakat yang berada tipis di atas garis kemiskinan.

Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditingkatkan karena capaian IPM pada Tahun 2022 sudah cukup baik dan melampaui proyeksi sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan berbagai Upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan sisi Kesehatan dengan meningkatkan pelayanan Rumah Sakit serta pembangunan rumah sakit baru. Dari sisi Pendidikan, Pemprov Banten juga mendorong sisi Pendidikan dengan menghadirkan unit-unit sekolah baru serta peningkatan sarana prasarana

Pendidikan lainnya. Dari sisi daya beli masyarakat, Pemprov Banten merupakan salah satu Provinsi terbaik dalam hal penanganan inflasi.

Proyeksi Rasio Gini ditingkatkan karena profil rasio gini yang fluktuatif setiap tahunnya. Berbeda dengan indikator lain yang memiliki kecenderungan linear tertentu, gini rasio cenderung fluktuatif. Salah satu penyebabnya adalah fluktuasi pengeluaran penduduk pengeluaran rendah, menengah, dan tinggi yang relatif sulit diprediksi.

Tabel 3. 3  
Proyeksi Indikator Makro Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator	Satuan	RKPD 2023		P-RKPD 2023	
		2022	2023	2022	2023
a. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,0-5,6**	5,02 - 5,15	5,03	4,70-5,20
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,7-9,2**	8,67	8,09	7,9
c. Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,99 - 5,4**	5,58	6,16	6,10
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,0	73,27	73,32	73,59
e. Rasio Gini	Indeks	0,370**	0,354	0,363	0,365

Sumber: Analisis Bappeda, 2023\*\* RKPD 2023

Proyeksi kinerja perekonomian Banten didasarkan pada beberapa asumsi:

A. Faktor Pendorong:

1. Peningkatan daya saing untuk produk baja olahan domestik seiring pencabutan kebijakan tax rebate Tiongkok untuk komoditas baja;
2. Mulai beroperasinya sejumlah pabrik baru dan peningkatan kapasitas produksi besar pada industri baja dan petrokimia di Provinsi Banten;
3. Berlanjutnya pembangunan beberapa PSN di wilayah Banten, seperti proyek jalan tol dan bendungan;
4. Akselerasi penjualan ekspor untuk produk baja berupa Hot Rolled Coil dengan level margin yang lebih baik ke negara non tradisional;
5. Konsumsi RT berpotensi meningkat sejalan dengan menguatnya daya beli masyarakat dan mobilisasi, serta didukung oleh berlanjutnya stimulus serta relaksasi perekonomian yang melanjutkan tren peningkatan;
6. Pemulihan kinerja korporasi;
7. TPT lebih rendah dibandingkan periode sebelum Covid-19;

8. Memastikan ketersediaan lapangan kerja dan dialog untuk mempertahankan industri padat karya di Banten;
9. Sektor Pertanian potensial untuk menyerap tenaga kerja, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian. Langkah yang ditempuh pemda melalui pembangunan Jalan Usaha Tani dan Irigasi Pertanian;
10. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi – Pro Job, yaitu penguatan efektivitas MOU Pendidikan Vokasi;
11. Banten penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, didukung oleh banyaknya Industri skala besar dan menengah;
12. Insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung investasi lainnya;
13. Adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten;
14. Di Pulau Jawa, IPM Provinsi Banten pada tahun 2022 berada di posisi tertinggi ketiga. Secara nasional, berada di posisi delapan dan selalu tercatat lebih tinggi dari angka nasional;
15. Upaya meningkatkan RLS antara lain penggratisan biaya pendidikan sekolah dasar, menengah, dan khusus, pembangunan USB, RKB, dan pemberian BOSDA;
16. Upaya mendorong AHH dengan memberikan dukungan biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan Rumah Sakit beserta infrastrukturnya (RSUD Banten, RSUD Labuan, RSUD Ciligrang, RS Jiwa dan Ketergantungan Obat), pembentukan tematik holistik penanggulangan stunting, dan pembentukan tim penanggulangan stunting;
17. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;
18. Mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas;
19. Ekspektasi inflasi yang semakin terkendali pasca penetapan berbagai kebijakan pendukung;

20. Sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah yang terjaga dengan baik berbagai kebijakan dan program nyata Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga harga di level stabil.

B. Faktor Penahan:

1. Krisis energi yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku;
2. Penerapan berbagai kebijakan dalam negeri di tengah ketidakpastian global dapat mendorong peningkatan harga bahan baku komoditas dunia dan berpotensi menahan konsumsi masyarakat;
3. Pergeseran bentuk pengeluaran masyarakat dari kebutuhan leisure ke non-leisure serta kecenderungan masyarakat berpendapatan tinggi yang masih menahan konsumsi;
4. Potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain dikarenakan Upah Minimum Regional yang lebih rendah;
5. Belum optimalnya penyelarasan (matching) antara kebutuhan Industri dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM;
6. Perbedaan antara kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Industri dengan kompetensi para pencari kerja;
7. Rendahnya daya saing pekerja Banten (mayoritas pekerja yang berpendidikan SD ke bawah);
8. Besarnya jumlah penduduk migran yang datang ke Provinsi Banten untuk mencari pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada relatif tingginya Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
9. Dari 729 SMK (81 Negeri dan 648 Swasta), hanya 281 sekolah yang berorientasi industry;
10. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
11. Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten;



12. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
13. Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten.

### 3.2. Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

#### 3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

##### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- 5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 7) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

- 8) Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
- 9) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
- 10) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 11) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 12) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Provinsi Banten;
- 2) Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2023;
- 3) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Provinsi Banten; dan
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.

**b. Dana Transfer**

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- 1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk setiap objek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten; dan
- 4) Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga.

**3.2.2. Belanja Daerah**

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan optimisme prediksi Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten dalam pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19;
- c. Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan;
- d. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

### 3.2.3. Pembiayaan

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan SILPA tahun 2023 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- c. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.
- d. Realisasi tahun 2022, tahun 2023 (per Maret 2023) Tahun, Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.4  
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Pada Penyempurnaan Rancangan  
Akhir Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4	PENDAPATAN DAERAH	11.547.460.023.771	11.792.408.786.460	244.948.762.689
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.544.574.336.460	8.797.574.336.460	253.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	7.944.849.811.619	8.287.205.993.432	342.356.181.813
4.1.02	Retribusi Daerah	120.886.373.105	16.724.030.580	(104.162.342.525)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67.712.793.358	60.755.038.425	(6.957.754.933)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	411.125.358.378	432.889.274.023	21.763.915.645
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.989.040.250.000	2.989.040.250.000	0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.989.040.250.000	2.989.040.250.000	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.845.437.311	5.794.200.000	(8.051.237.311)
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.845.437.311	5.794.200.000	(8.051.237.311)
5	BELANJA	11.774.651.290.735	11.861.311.604.456	86.660.313.721
5.1	BELANJA OPERASI	6.835.097.862.719	6.831.524.854.624	(3.573.008.095)
5.1.01	Belanja Pegawai	2.397.488.403.632	2.445.500.257.951	48.011.854.319
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.807.571.997.487	3.757.161.461.473	(50.410.536.014)
5.1.03	Belanja Bunga	1.285.894.000	1.285.894.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	598.567.367.600	598.123.271.200	(444.096.400)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.184.200.000	29.453.970.000	(730.230.000)
5.2	BELANJA MODAL	1.794.289.757.043	1.564.800.206.725	(229.489.550.318)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	204.135.392.749	77.944.449.299	(126.190.943.450)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.101.967.091	423.409.932.545	(33.692.034.546)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	640.954.120.722	544.346.444.412	(96.607.676.310)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	455.365.049.471	481.011.531.159	25.646.481.688
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.364.988.110	36.212.805.810	(152.182.300)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	368.238.900	1.875.043.500	1.506.804.600
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	79.042.715.378	64.042.715.378	(15.000.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	79.042.715.378	64.042.715.378	(15.000.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	3.066.220.955.595	3.400.943.827.729	334.722.872.134
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.866.940.955.595	3.201.663.827.729	334.722.872.134
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	199.280.000.000	199.280.000.000	0
	Total Surplus/(Defisit)	(227.191.266.964)	(68.902.817.996)	158.288.448.968
6	PEMBIAYAAN	227.191.266.964	68.902.817.996	(158.288.448.968)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	615.689.000.000	468.942.028.785	(146.746.971.215)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	615.689.000.000	468.942.028.785	(146.746.971.215)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan			0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	388.497.733.036	400.039.210.789	11.541.477.753
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	250.000.000.000	250.000.000.000	0
6.2.03	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.497.733.036	150.039.210.789	11.541.477.753
6.3				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Dimana RPJMD ke-5 atau RPD arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah “*Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa*”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode tahun 2017-2022 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Provinsi Banten dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4. 1  
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan menjadi 5,37% (2026)	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan : nilai)	52,83	58,13	71,06

VISI: "BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,644	0,665	0,695
				Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,71	7,74	7,79
			Tingkat Pengangguran Terbuka 8,98% (2021) menjadi 8,20% (2026)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	64,48	65,19	66,24
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	8,93	9,11	9,40
				dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,02	13,75	14,30
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,02	70,40	70,83
					Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	24,50	23,50	22,00
				Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	91,67	93,07	93,91
				Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	52,63	55,03	58,63
					Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	48,67	49,42	51,67
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,44% (2021) menjadi 5,27 - 5,41 (2026)	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,87	3,97	6,82
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,93	4,99	5,69

VISI: "BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
					LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	1,84	2,44	4,24
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,30	4,39	4,66
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,56	0,68	1,04
			Indeks Williamson 0,625 (2021) menjadi 0,618 (2026)	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi
			Indeks Gini 0,363 (2021) menjadi 0,336 (2026)	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.033	12.168	12.573
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 14,48% (2021) menjadi 20% (2026)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,94	62,99	63,14
				Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	149,08	147,37	140,02
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi 61 (2021) menjadi 81 (2026)	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	65,88	69,77	80,00
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	55,89	82,20	87,60
					Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2	2-3	2-3
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (satuan: nilai)	3,45	3,47	3,53
				Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh



Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Banten untuk Tahun 2023 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan  
 Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	
<b>Visi : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA</b>				
<b>Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas</b>				
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	1.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	1.1.1. Meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat desa	▪ Peningkatan kelembagaan pemerintah desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa	
	1.2. Meningkatnya pelayanan sosial	1.2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar sosial bagi penerima layanan dasar sosial	▪ Peningkatan pemberdayaan dan pemenuhan SPM bidang sosial	
	1.3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	1.3.1. Meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat desa	▪ Peningkatan kelembagaan pemerintah desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa	
	1.4. Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		1.4.1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing pelatihan calon tenaga kerja	a. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan Balai Latihan Kerja
				b. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan penyandang disabilitas
	1.5. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat		1.5.1. Mengembangkan kebijakan pendidikan vokasi	▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan vokasi
			1.5.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	▪ Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek
			1.5.3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah	▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		1.5.4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus	▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus
		1.5.5. Mengembangkan kebudayaan, kesenian, dan sejarah daerah melalui sarana pendidikan dan festival budaya	▪ Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
1.6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1.6.1.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis, sarana, dan prasarana kesehatan	a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan b. Peningkatan upaya penanggulangan pandemi covid-19
	1.6.2.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	▪ Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat
	1.6.3.	Menurunkan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor	▪ Peningkatan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor
1.7. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	1.7.1.	Meningkatkan kesetaraan gender	▪ Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi
	1.7.2.	Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi. c. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		1.7.3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi.</li> </ul>
		1.7.4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>
	1.8. Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	1.8.1. Mengembangkan kebudayaan, kesenian, dan sejarah daerah melalui sarana pendidikan dan festival budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan</li> </ul>
		1.8.2. Memperkuat karakter pemuda melalui prestasi olahraga dan non-olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga Tingkat Nasional</li> </ul>
<b>Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan</b>			
2. Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	2.1. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	2.1.1. Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan Pangan Daerah	<p>a. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi</p> <p>b. Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sektor pangan</p>
		2.1.2. Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu</li> </ul>
		2.1.3. Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital</li> </ul>
		2.1.4. Meningkatkan Omset UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu</li> </ul>
	2.2. Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	2.2.1. Meningkatkan Nilai Investasi dengan Promosi Potensi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO</li> </ul>

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		2.2.2. Meningkatkan Pelayanan dengan Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan layanan investasi dengan Kemudahan Perizinan sesuai UU Cipta Kerja</li> <li>Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten</li> </ul>
	2.3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	2.3.1. Meningkatkan Pangsa Pasar Ekspor Non Migas Komoditas Unggulan Daerah (Luar daerah dan Luar negeri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jumlah Eksportir Non Migas Komoditas Unggulan Daerah</li> </ul>
		2.3.2. Meningkatkan Stabilitas Barang Pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Manajemen Pusat Distribusi Perdagangan</li> </ul>
		2.3.3. Mengembangkan sektor industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penembangan kualitas produk industri</li> </ul>
	2.4. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.4.1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata dan Mengembangkan Potensi Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset</li> </ul>
	2.5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	2.5.1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya</li> </ul>
		2.5.2. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (<i>off farm</i>)</li> </ul>
	2.6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	2.6.1. Meningkatkan kualitas jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan</li> </ul>
		2.6.2. Meningkatkan ketersediaan jaringan jalan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan Provinsi</li> </ul>
		2.6.3. Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan</li> </ul>

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		2.6.4. Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan bendungan dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi</li> </ul>
		2.6.5. Meningkatkan prasarana sistem drainase dalam WS Provinsi dan pencegahan bencana tsunami di wilayah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan prasarana pengendalian banjir</li> </ul>
		2.6.6. Meningkatkan profesionalisme badan usaha jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sumber daya badan usaha jasa konstruksi</li> </ul>
		2.6.7. Meningkatkan prasarana akses air bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum.</li> </ul>
		2.6.8. Membangun TPA Regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pembangunan TPA Regional yang berkualitas</li> </ul>
		2.6.9. Penangan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik</li> </ul>
		2.6.10. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh</li> </ul>
		2.6.11. Membangun SPAL-D Regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional</li> </ul>
		2.6.12. Meningkatkan pembangunan dan pengelola gedung sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi</li> </ul>
		2.6.13. Meningkatkan sarana, prasarana, dan Penyelenggaraan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan</li> </ul>

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		2.6.14. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, koordinasi dan pelayanan sub sektor energi dan ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan</li> </ul>

**Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**

3. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	3.1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3.1.1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan dan peningkatan pengelolaan Tahura Banten serta perhutanan sosial</li> </ul>
		3.1.2. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan</li> </ul>
		3.1.3. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi, Pembinaan dan pengawasan</li> </ul>
		3.1.4. Meningkatkan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral</li> </ul>

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
	3.2. Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana	3.1.5. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan resiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana, dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan</li> </ul>

**Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa**

4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	4.1. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	4.1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja</li> </ul>
		4.1.2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>▪ Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD</li> </ul>
		4.1.3. Meningkatkan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis <i>e-government</i></li> <li>b. Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur</li> </ul>

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
			c. Peningkatan kualitas kajian dan implementasi kebijakan, serta inovasi pelayanan publik berdasarkan prinsip Organisasi Perangkat Kerja Daerah hemat struktur kaya fungsi
		4.1.4. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	▪ Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal
	4.3. Meningkatkan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	4.3.1. Meningkatkan ketahanan sosial budaya ideologi dan kerukunan sosial	a. Peningkatan budaya politik yg demokratis, jujur dan bertanggung jawab berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa b. Penurunan kerawanan konflik masyarakat c. Peningkatan kualitas demokrasi melalui dukungan pelaksanaan PEMILU-PILKADA Langsung

Prioritas pembangunan pada perubahan RKPD Tahun 2023 tidak mengalami perubahan masih merujuk pada dokumen RKPD Tahun 2023.

#### 4.2. Tema RKPD Tahun 2023

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2023 dan tema RKP Tahun 2023, adalah “*Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi*”. Keselarasan antara tema RKP Tahun 2023-2026 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 disajikan dalam diagram berikut.





Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

#### 4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Pada Bab II, telah dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan;
3. Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
4. Implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal.

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah tahun 2023 adalah:

1. Daya saing Sumber Daya Manusia;
2. Daya saing perekonomian;
3. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan isu-isu strategis daerah tersebut, dirumuskan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023.

Untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas, dilakukan pembobotan melalui diskusi kelompok terpumpun. Hasil dari diskusi tersebut dianalisis dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi. Variabel yang digunakan untuk menilai prioritas adalah: ketersediaan anggaran dan SDM, keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, akselerasi pencapaian indikator makro daerah, kondisi lingkungan strategis untuk menunjang pencapaian kinerja, sinergitas dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keterlibatan aktor pembangunan, serta keterkaitan dengan RPJPD.

Partisipan dalam diskusi kelompok memilih isu pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, disusul oleh peningkatan daya saing SDM, diikuti oleh isu lingkungan dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, hierarki prioritas pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan hasil analisis adalah:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3  
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis dan  
Prioritas Daerah

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Tahun 2023
1	Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan	Daya saing perekonomian	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
2	Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Daya saing SDM	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3	Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
4	Implementasi Reformasi Birokrasi yang belum optimal	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Selanjutnya, rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten tahun 2023 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten yang tertuang dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sehingga menghasilkan program prioritas tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4. 4  
Prioritas Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan : nilai)	58,13	Prioritas 2 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Peningkatan kualitas keluarga sejahtera	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,665			Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Desa
		Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,74			Peningkatan Pelayanan Sosial	Peningkatan Pemenuhan dan Bidang Sosial
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,19			Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja
		Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,11			Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus</li> <li>▪ Peningkatan akses dan kualitas</li> </ul>

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							<ul style="list-style-type: none"> <li>pendidikan vokasi</li> <li>• Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah</li> <li>• Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek</li> </ul>
			Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,75			Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,40		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>• Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan</li> </ul>
			Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,50		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting
		Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,07		Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi</li> <li>• Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</li> <li>• Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak</li> <li>• Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</li> <li>• Penyediaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan</li> </ul>

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							husus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi.
		Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	55,03		Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
			Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,42		Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga tingkat nasional
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.168	Prioritas 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Beli Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital</li> <li>• Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu</li> <li>• Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu</li> <li>• Peningkatan Ketersediaan Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi</li> </ul>
		Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,97		Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO</li> <li>• Peningkatan pelayanan investasi dengan Kemudahan Perizinan sesuai UU Cipta Kerja</li> <li>• Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten</li> </ul>
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,99		Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kualitas produk industri</li> </ul>

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
			LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	2,44			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Manajemen Pusat Distribusi</li> <li>• Peningkatan Jumlah Eksportir Non Migas Komoditas Unggulan Daerah</li> </ul>
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,39		Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,68		Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (off farm)</li> <li>• Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya</li> </ul>
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan</li> <li>• Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan provinsi</li> <li>• Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan</li> <li>• Pemanfaatan Bendung dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi</li> <li>• Pengelolaan prasarana pengendalian banjir</li> <li>• Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional</li> <li>• Perencanaan pembangunan TPA Regional yang berkualitas</li> <li>• Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan Kawasan strategis Provinsi</li> </ul>

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum,</li> <li>• Peningkatan Sumber Daya Badan Usaha Jasa Konstruksi</li> <li>• Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik</li> <li>• penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh</li> <li>• Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan</li> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan</li> </ul>
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,99	Prioritas 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten</li> <li>• Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui</li> </ul>

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							Penguatan Regulasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan</li> <li>• Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan</li> <li>• Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral</li> </ul>
		Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	147,37		Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana</li> <li>• Penurunan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan</li> </ul>
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,77	Prioritas 4 Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan</li> <li>• Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan</li> <li>• Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>



No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja</li> </ul>
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	82,20			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD</li> </ul>
			Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan manajemen dan profesionalisme Aparatur</li> <li>• Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal</li> </ul>
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (satuan: nilai)	3,47			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government</li> <li>• Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, Kajian dan Inovasi pelayanan publik</li> </ul>
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh		Peningkatan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan budaya politik yang demokratis, jujur dan bertanggung jawab berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa</li> <li>• Penurunan kerawanan konflik masyarakat</li> </ul>

Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam RKP 2023 sebagai berikut.

1. *Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;*

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. *Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;*

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. *Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;*

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. *Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;*

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan

kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. *Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;*

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. *Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;*

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. *Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.*

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Hasil penyelarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas sebagai berikut:

Tabel 4. 5  
Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten  
dengan Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM
PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan berkeadilan	Prioritas-1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Program pengelolaan energi terbarukan
Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Program pengelolaan sumber daya air (SDA) Program pengelolaan hutan Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Program penanganan kerawanan pangan Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Program pengawasan keamanan pangan Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Program perizinan usaha pertanian Program penyuluhan pertanian Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Program pengelolaan perikanan tangkap Program pengelolaan perikanan budidaya Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) Program pengembangan umkm Program perizinan dan pendaftaran perusahaan Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Program standardisasi dan perlindungan konsumen Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Program perencanaan dan pembangunan industri Program pengendalian izin usaha industri Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
	Program pemasaran pariwisata
	Program pemasaran pariwisata
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
	Program pelayanan penanaman modal
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
	Program pengembangan iklim penanaman modal
	Program promosi penanaman modal
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Program pengembangan ekspor
PN-2	Prioritas-1
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
Pembangunan wilayah Jawa Bali	Program penataan desa
	Program peningkatan kerjasama desa
	Program administrasi pemerintahan desa
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
PN-3	Prioritas 2
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Program pengendalian penduduk
	Program pembinaan keluarga berencana (kb)
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)
	Program pendaftaran penduduk
	Program pencatatan sipil
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
	Program pengelolaan profil kependudukan
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Program pemberdayaan sosial
	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
	Program rehabilitasi sosial
	Program perlindungan dan jaminan sosial
	Program penanganan bencana
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
	Program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman
Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program pengelolaan pendidikan
	Program pengembangan kurikulum
	Program pengembangan kurikulum

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM
	Program pendidik dan tenaga kependidikan
	Program pengendalian perizinan pendidikan
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Program pemenuhan hak anak (pha)
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
	Program peningkatan kualitas keluarga
	Program perlindungan perempuan
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak
	Program perlindungan khusus anak
	Program pengembangan daya saing keolahragaan
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan
Pengentasan Kemiskinan	Program perlindungan dan jaminan sosial
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Program penelitian dan pengembangan daerah
	Program perencanaan tenaga kerja
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
	Program penempatan tenaga kerja
	Program hubungan industrial
	Program pengawasan ketenagakerjaan
PN-4	Prioritas 2
Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Program pengembangan kebudayaan
	Program pengelolaan permuseuman
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Program kesejahteraan rakyat
Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Program pembinaan perpustakaan
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Program pengelolaan arsip
	Program perlindungan dan penyelamatan arsip
PN-5	Prioritas-1
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
Infrastruktur Pelayanan Dasar	Program pengembangan perumahan
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
	Program pengembangan permukiman

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM
	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum Program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Program penatagunaan tanah Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
Infrastruktur Ekonomi	Program penyelenggaraan jalan Program penyelenggaraan jalan Program pengembangan jasa konstruksi Program pengelolaan pelayaran Program pengelolaan perkeretaapian Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Program kawasan permukiman Program penataan bangunan gedung Program penataan bangunan dan lingkungannya
Energi dan ketenagalistrikan	Program pengelolaan ketenagalistrikan
Transformasi Digital	Program pengelolaan aplikasi informatika
PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Program pengelolaan keanekaragaman hayati Program perencanaan lingkungan hidup Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH Program penanganan pengaduan lingkungan hidup Program pengelolaan persampahan Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Program pengelolaan hutan Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Program penyelenggaraan penataan ruang Program pengelolaan aspek kegeologian Program pengelolaan mineral dan batubara

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Program penanggulangan bencana Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Konsolidasi Demokrasi	Prioritas 4 Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah Program penyelenggaraan statistik sektoral Program penataan organisasi Program penyelenggaraan pengawasan Program pengelolaan keuangan daerah Program pengelolaan barang milik daerah Program pengelolaan pendapatan daerah Program kepegawaian daerah Program pengembangan sumber daya manusia Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa Program fasilitasi dan koordinasi hukum Program pengelolaan arsip Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Program pengelolaan aplikasi informatika Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

**4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten dalam lingkup Kewilayahan Nasional Tahun 2023**

Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian integral dari pembangunan nasional, diarahkan untuk mendukung 7 agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sesuai urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.



Secara lebih spesifik, Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 juga memperhatikan Target Pembangunan Wilayah, Prioritas Pembangunan Wilayah, dan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

A. Target Pembangunan Wilayah

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, target pembangunan yang ditetapkan untuk Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6  
Target Pembangunan Provinsi Banten  
dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024				
		2020	2021	Target		
				2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)*	5,40	5,50	5,60	5,7	5,8
2	Tingkat Pengangguran Terbuka*	8,00	7,80	7,70	7,30	7,00
3	Tingkat Kemiskinan*	4,80	4,50	4,00	3,65	3,48
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54
5	Indeks Gini**	0,385	0,377 - 0,382	0,376 - 0,378	0,375 - 0,377	0,374 - 0,376

B. Prioritas Pembangunan Wilayah

Lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan untuk Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah:

Koridor Pertumbuhan	Koridor Pemerataan
Kota Cilegon* Kabupaten Serang Kota Serang* Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan	Kabupaten Pandeglang

Kota Cilegon dan Kota Serang termasuk dalam Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW.

Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dalam RPJMN Tahun 2020-2024, akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Adapun untuk Provinsi Banten adalah:

1. Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan pada tahun 2020-2024 adalah pengembangan komoditas unggulan, yang untuk Provinsi Banten adalah kopi, lada, pala, dan perikanan budidaya. Sedangkan untuk sentra produksi pertanian dan perkebunan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) adalah komoditas jagung.

2. Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang untuk Provinsi Banten, di KEK Tanjung Lesung;
- 2) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, yang untuk Provinsi Banten, adalah Pembangunan Jalan Tol Serang –Panimbang, Jalur Ganda KA Rangkasbitung– Merak, Reaktivasi KA Rangkasbitung-Labuan/Bayah;
- 3) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 4) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi:
  - a. Pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
  - b. Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi

tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung);

c. Penanganan anak tidak sekolah.

3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah Pengembangan kawasan perkotaan, untuk Provinsi Banten, di Kota Cilegon dan Kota Serang.

4. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Daerah Tertinggal

- 1) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah entas, di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang;
- 2) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
- 3) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama, yang untuk Provinsi Banten, di KPPN Pandeglang;
- 4) Penanganan stunting;
- 5) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat;
- 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang untuk Provinsi Banten ditujukan pada Pemantapan pemulihan pasca bencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya.

5. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak.
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang untuk Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas untuk Provinsi Banten meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang;
- 13) Penataan Ruang dan Lahan
  - a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
  - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
  - c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
  - d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
  - f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadaster;
  - g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
  - h. Pembentukan bank tanah;
  - i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
  - j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
  - a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;

- b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
- c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana;
- d. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi:
  - a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi;
  - d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.
- e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci;
- f. Pengembangan energi baru terbarukan;
- g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
- h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Sedangkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di Provinsi Banten untuk mendorong percepatan pembangunan Wilayah, adalah Pembangunan Kota Baru Maja, dan Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda.

#### **4.5. Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial**

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Hal ini diatur pada Bab mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 7 dan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor

potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Pendekatan tematik pada Perubahan RKPD Provinsi Banten 2023 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam Perubahan RKPD 2023 adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketahanan Pangan Daerah

Tematik ketahanan pangan daerah diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

- a. Peningkatan produksi pangan
  - Irigasi Primer dan Sekunder
  - Irigasi Tersier
  - Jalan Usaha Tani
  - Revitalisasi Pelabuhan
  - Sentra Produksi Pertanian
  - Sentra Produksi Peternakan
  - Komoditas perikanan budidaya
  - Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan
- b. Ketersediaan dan distribusi pangan
  - Pemenuhan Cadangan Pangan Provinsi
  - Pusat Distribusi Provinsi (PDP)
- c. Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
  - Akses Pangan Masyarakat
  - Keamanan Pangan

Strategi dan fokus penanganan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. 7  
Integrasi Program pada Tematik Ketahanan Pangan Daerah

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Peningkatan Produksi Pangan	Irigasi Primer dan Sekunder	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	▪ Malingping, Cibadak Cimenteng jaya dan Wanasalam (Kab Lebak) ▪ Kadujajar, Bojong, Cisata dan Kondang Jaya (Kab. Pdg)	DPUPR
	Irigasi Tersier	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kab Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kab. Tangerang	Dinas Pertanian
	Jalan Usaha Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab Pandeglang Kab. Lebak	Dinas Pertanian
	Revitalisasi Pelabuhan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Binuangeun/Cikeusik (Kab. Lebak/Kab.Pdg) dan Labuan (Kab. Pdg)	DKP
	Sentra Produksi Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian • Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota. Serang, Kota Cilegon	Dinas Pertanian
	Sentra Produksi Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kab Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Tangerang	Dinas Pertanian
	Komoditas perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut • Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut • Penjaminan Ketersediaan Sarana	Cimanuk, Cigorondong (Kab. Pdg)	DKP

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			Pembudidayaan Ikan di Laut		
	Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur</li> <li>• Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</li> <li>• Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan</li> </ul>	Rangkasbitung (Kab Lebak), Pandeglang (Kab. Pdg), Pontang (Kab. Srg) Jayanti (Kab. Tgr), Kasemen (Kota Srg)	Dinas Ketapang
Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Pemenuhan Cadangan Pangan Provinsi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</li> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</li> </ul> Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</li> </ul>	Curug (Kota Serang)	Dinas Ketapang
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li> </ul>	Kosambi, Pagedangan, (Kab Tgr), Curug, Cisauk	Dinas Ketapang
	Pusat Distribusi Provinsi (PDP)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional</li> </ul>	Kopo (Kab . Srg)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/sub Kegiatan dan Pusat Distribusi Provinsi	Lokasi	OPD Pelaksana
Keterjangkauan dan Keamanan Pangan	Akses Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan</li> <li>• Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</li> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</li> </ul>	Rangkasbitung (Kab Lebak), Pandeglang (Kab. Pdg), Cikande (Kab. Srg) Tigaraksa (Kab. Tgr), Serang (Kota Srg), Ciwedus (Kota Clg), Batu Ceper (Kota Tgr), Serpong (Kota Tangsel)	Dinas Ketahanan Pangan
	Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi</li> </ul>	Rangkasbitung (Kab Lebak), Pandeglang (Kab. Pdg), Cikande (Kab. Srg) Tigaraksa (Kab. Tgr), Serang (Kota Srg), Bandungan (Kota Clg), Cikokol (Kota Tgr), Pamulang Barat (Kota Tangsel)	

## 2. Pengurangan Pengangguran melalui pendidikan vokasi dan Kewirausahaan

Tematik pengurangan pengangguran diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

### a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja

- Revitalisasi SMK melalui penguatan kelembagaan SMK, Penguatan pengelolaan keuangan SMK dan Penguatan Manajerial SMK Negeri dan SMK Swasta;
- Modernisasi BLKI Serpong dan Pembangunan BLKI Baru;
- Penempatan Tenaga Kerja;
- Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### b. Peningkatan Kuantitas Permintaan Tenaga Kerja

- Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam MoU SMK/Vokasi;
- Implementasi Super Deductive Tax;
- Keterlibatan UKM dalam menyerap angkatan kerja;
- Evaluasi Pasar Kerja mengenai efektivitas MoU SMK/Vokasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri;

- Peningkatan Investasi Industri dan Dunia Usaha;
- Intensifikasi Utilitas Kawasan Industri dan Ekstensifikasi Kawasan Industri.

c. Penciptaan Wirausaha

- Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);
- Pembinaan dan pengembangan UKM;
- Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Kewirausahaan Pemuda;
- Kewirausahaan Perempuan;
- Pembinaan dan Pengembangan IKM.

Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik Pengurangan Pengangguran dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. 8  
Integrasi Program pada Tematik Pengurangan Pengangguran melalui Penguatan Pendidikan Vokasi dan Kewirausahaan

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Revitalisasi SMK melalui penguatan kelembagaan SMK, Penguatan pengelolaan keuangan SMK dan Penguatan Manajerial SMK Negeri dan SMK Swasta	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Menengah Kejuruan Pendidikan	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dindikbud
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Teknis ▪ Pelatihan Keuangan Bagi Guru SMK; ▪ Pelatihan Pengelolaan Dana BOS Bagi Bendahara SMA/SMK dan SKh	Kab. Pandeglang	BPSDM
Modernisasi Serpong dan Pembangunan BLKI Baru	BLKI dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Tangerang Kota Serang	Disnaker
			Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ▪ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ▪ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		
Penempatan Tenaga Kerja		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota ▪ Pelayanan Antar Kerja ▪ Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Disnaker
Pengembangan SDM Pariwisata		Program Pengembangan Sumberdaya	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kab. Serang Kab. Tangerang	Dispar

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
	dan Kreatif	Manusia dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</li> <li>▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</li> <li>▪ Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</li> <li>▪ Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</li> </ul>	Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	
Peningkatan Kuantitas Permintaan Tenaga Kerja	Keterlibatan Dunia Usaha dan Industri dalam MoU SMK/Vokasi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</li> </ul>	Kota Serang	
	Implementasi Super Deductive Tax	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan</li> </ul>	Kota Serang	DPMPSTP
	Keterlibatan UKM dalam menyerap angkatan kerJa	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dinkop KUKM
	Evaluasi Pasar Kerja mengenai efektivitas MoU SMK/Vokasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah</li> </ul>	Kota Serang	Dindik
		Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Disnaker

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
	Peningkatan Investasi Industri dan Dunia Usaha	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	DPMPTSP
	Intensifikasi Utilitas Kawasan Industri dan Ekstensifikasi Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Disperindag
Penciptaan wirausaha	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dinkop UKM
	Pembinaan dan pengembangan UKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dinkop UKM
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dispar
	Kewirausahaan Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dispora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dispora
	Kewirausahaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</li> </ul>	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	DP3AKKB
	Pembinaan dan Pengembangan IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Kota Cilegon	Disperindag

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</li> </ul>	Kota Tangerang	

### 3. Percepatan Penurunan Stunting

Tematik Percepatan Penurunan Stunting diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran
  - Pembentukan Surat Keputusan Gubernur Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (SK TPPS);
  - Verifikasi dan Evaluasi Renstra dan Renja 2023 Perangkat Daerah terkait.
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan
  - Intervensi kelompok sasaran 1000 HPK;
  - Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
  - Peningkatan Akses dan Kualitas Gizi dan Kesehatan;
  - Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak.
- c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan
  - Penilaian Kinerja Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Banten;
  - Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi di Provinsi Banten.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
  - Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten;
  - Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS;
  - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam percepatan penurunan stunting.

Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik Percepatan Penurunan Stunting dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. 9  
Integrasi Program pada Tematik Percepatan Penurunan Stunting

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Penguatan perencanaan dan penganggaran	Pembentukan Surat Keputusan Gubernur Tim Percepatan Penurunan Stunting (SK TPPS)				Dindikbud
	Verifikasi dan Evaluasi Renstra Renja Perangkat Daerah terkait	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Pemerintahan dan Manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dokumen Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> </ul>	Kota Serang	BAPPEDA
peningkatan kualitas pelaksanaan;	Intervensi kelompok sasaran 1000 HPK	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>	Kab. Lebak, Pandeglang dan Kab. Tangerang	DPMD
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pengelolaan pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhan 1.000 HPK</li> <li>Pelaksanaan Fasilitasi Pembimbingan Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1.000 HPK</li> </ul>	Kab. Lebak, Kab Pandeglang	DP3AKKB
		Program Pengelolaan pendidikan	Kegiatan Pengelolaan pendidikan Menengah Atas <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li> <li>Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa</li> </ul>	SMA 17 Pandeglang  Semua Kab/kota	Dindikbud
			Kegiatan Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah</li> </ul>	SMK 1 Wanasalam SMK Pertanian Kota Serang	
	Peningkatan Penyediaan Air dan Sanitasi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan penyediaan PSU Permukiman</li> <li>Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman</li> </ul>	Semua kab/kota	Dinas PRKP
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design</li> </ul>	Semua kab/kota	Dinas PRKP

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			(DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) Ha <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) ha</li> <li>Perbaiki rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) Ha</li> <li>Pelaksanaan Pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha</li> </ul>		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</li> </ul>	Semua kab/kota	Dinkes
	Peningkatan Akses dan Kualitas Gizi dan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</li> </ul>	Semua kab/kota	Dinkes
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan</li> </ul>	Kota Serang	RSUD Banten
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</li> </ul>	Semua kab/kota	Dinsos
	Peningkatan Akses Pangan dan Gizi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan /berbasis Sumber Daya Lokal</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</li> </ul>	Semua kab/kota  Kab Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi</li> </ul>	Semua Kab/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman "Pengawasan Mutu, <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan</li> </ul>	Kab. Pandeglang dan Lebak	Dinas Pertanian

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hortikultura</li> </ul>		
		Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ Distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</li> </ul>	Semua kab/kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</li> </ul> Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</li> </ul>	Semua kab/kota	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pengelolaan pelaksanaan Desain Program Pengulangan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana</li> </ul>	Semua kab/kota	DP3AKKB
peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan	Penilaian Kinerja Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Banten	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> </ul>	Kota Serang	BAPPEDA
	Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi di Provinsi Banten	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</li> </ul>	Kota Serang	BAPPEDA
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Rapat Koordinasi teknis pembangunan manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia</li> </ul>		
	Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul> Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Semua kab/kota	Dinkes
				Kab. Tangerang	



Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul>		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus</li> </ul>	Kab. Lebak	RSUD Malingping
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat</li> </ul>	Kab. Pandeglang, Lebak dan Kab. Tangerang	DPMD
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam percepatan penurunan stunting.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa</li> </ul>	Kab. Pandeglang, Lebak dan Kab. Tangerang	DPMD

#### 4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cibanten

Tematik pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cibanten diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

- a. Penurunan Sedimentasi di DAS Cibanten dengan Pengurangan erosi
  - Penanganan Lahan Kritis
- b. Pengelolaan limbah
  - Penanganan Limbah Industri dan Limbah Medis;
  - Penanganan Air Limbah Domestik;
  - Pengelolaan Sampah.
- c. Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penertiban Pemanfaatan Ruang
  - Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Cibanten;
  - Penegakan Hukum;
  - Pemantauan Kualitas Air dan Pengujian Kualitas Air;
  - Pemberian atau Perpanjangan Perizinan.
- d. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air
  - Normalisasi DAS Cibanten;
  - Pembangunan Tembok Penahan Tanah;
  - Pengendalian Banjir Sungai Cibanten;
  - Pengelolaan Sumber Daya Air.

e. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

- Edukasi dan sosialisasi Kepada industri, institusi pendidikan dan masyarakat sekitar DAS Cibanten;
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Provinsi;
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.

Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cibanten dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. 10  
Integrasi Program pada Tematik Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cibanten

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Penurunan Sedimentasi di DAS Cibanten dengan Pengurangan erosi	Penanganan Lahar Kritis	Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara</li> </ul>	Lokasi Hulu DAS Cibanten (Ciomas/Gunung Sari)	DLHK
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS</li> <li>▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS</li> </ul>	DAS Cibanten Lokasi Hulu DAS Cibanten (Ciomas/Gunung Sari)	DLHK
Pengelolaan Limbah	Penanganan Limbah Industri dan Limbah Medis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan</li> </ul>	Kota Serang	DLHK
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</li> <li>▪ Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> </ul>	Kab. Serang	DLH Kab Serang
	Penanganan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>▪ Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</li> </ul>	Kab. Serang	DPKPTB Kab Serang
	Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kab. Serang, Kota Serang	DLHK Kab. Serang DLHK Kota Serang

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah</li> <li>Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah</li> </ul> Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</li> <li>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</li> <li>Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</li> <li>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</li> <li>Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</li> </ul>		
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Cibanten	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Perumahan di Lokasi Relokasi Program Pemerintah</li> </ul>	Kota Serang	Dinas PRKP
	Penegakan Hukum	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang</li> <li>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</li> </ul>	Kab. Serang, Kota Serang	Dinas PUPR Kab. Serang Dinas PUPR Kota Serang
	Pemantauan Kualitas Air dan Pengujian Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</li> </ul> Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup</li> </ul>		
	Pemberian atau Perpanjangan Perizinan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan</li> <li>Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</li> </ul>	DAS Cibanten	DLHK Provinsi Banten
	Normalisasi DAS Cibanten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan Panta dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		DPUPR Prov Banten

Kota Serang

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai</li> </ul>		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	DPUPR Kab. Serang
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normalisasi/Restorasi Sungai</li> </ul> Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Serang	PUPR Kab Serang
	Pengendalian Banjir Sungai Cibanten.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Perkuatan Tebing</li> </ul> Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cibanten.	Kota Serang	Kementerian PUPR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cibanten;</li> <li>Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cibanten;</li> <li>Pengadaan Tanah Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cibanten.</li> </ul> Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Dinas PUPR Prov. Banten
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir</li> </ul> Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	Dinas PUPR Kab. Serang
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi	Edukasi dan sosialisasi Kepada industri, institusi pendidikan dan masyarakat sekitar DAS Cibanten	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kota dan Kab. Serang	Dindikbud
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> </ul> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> </ul> Pengelolaan Pendidikan Khusus		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> </ul>		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Provinsi	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Kota Serang dan Kabupaten Serang	BPBD Provinsi Banten
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)</li> </ul>		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Serang dan Kabupaten Serang	BPBD Provinsi Banten
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</li> </ul>		
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Serang dan Kabupaten Serang	BPBD Provinsi Banten
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> </ul>		

## 5. Manajemen Kinerja Pemerintahan

Tematik manajemen kinerja pemerintah diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

- a. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  - Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan;
  - Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP.
- b. Penguatan Akuntabilitas Keuangan
  - Penguatan inventarisasi aset daerah;
  - Peningkatan Kualitas Penatausahaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah;
  - Peningkatan Pendapatan Daerah.
- c. Penguatan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
  - Penguatan indeks pengelolaan barang dan jasa;
  - Penguatan zona integritas.
- d. Penguatan kualitas pelayanan publik
  - Peningkatan manajemen aparatur melalui penerapan sistem merit;
  - Peningkatan profesionalisme aparatur dalam komponen kompetensi;
  - Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Publik berbasis e-Gov;
  - Penguatan inovasi daerah.

Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik manajemen kinerja pemerintahan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. 11  
Integrasi Program pada Tematik Manajemen Kinerja Pemerintahan

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<p>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi</li> </ul> <p>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul> <p>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Bappeda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> <li>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> </ul> <p>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> <li>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> </ul> <p>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> <li>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Bappeda
	Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Penataan Organisasi	<p>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Biro Organisasi dan RB

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
	Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	KP3B Serang	Kota Inspektorat
Penguatan Akuntabilitas Keuangan	Penguatan inventarisasi aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>• Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah</li> </ul>	KP3B Serang	Kota BPKAD
	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</li> <li>• Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi</li> </ul> Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</li> </ul>	KP3B Serang	Kota BPKAD
	Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penagihan Pajak Daerah</li> <li>• Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</li> </ul> Pengelolaan Pendapatan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Bapenda
Penguatan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Penguatan indeks pengelolaan barang dan jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul> Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</li> </ul> Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Biro Barjas
	Penguatan zona integritas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</li> <li>• Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Inspektorat
Penguatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan manajemen aparatur melalui	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Disiplin ASN</li> <li>• Pembinaan Disiplin ASN</li> </ul>	KP3B Serang	Kota BKD

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
	penerapan sistem merit		Pengadaan, Pemberhentian dan Infogadaan Kepegawaian ASN <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</li> </ul>		
	Peningkatan profesionalisme aparatur dalam komponen kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kompetensi Pemerintahan</li> </ul> Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kompetensi Manajemen</li> </ul>	KP3B Serang	Kota BPSDM
	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Publik berbasis e-Gov	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</li> <li>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</li> <li>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</li> <li>Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</li> <li>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</li> <li>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Diskominfo
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Monitoring Opini dan Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Informasi Publik</li> <li>Manajemen Komunikasi Krisis</li> <li>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</li> <li>Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</li> <li>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Diskominfo



Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<p>Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</li> <li>• Membangun Metadata Statistik Sektoral</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</li> <li>• Pengembangan Infrastruktur</li> <li>• Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah</li> </ul>		
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	<p>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi</li> <li>• Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</li> <li>• Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Diskominfo
		Program Penataan Organisasi	<p>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan</li> </ul> <p>Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</li> <li>• Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja</li> <li>• Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> </ul> <p>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Biro organisasi dan RB
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<p>Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Biro Hukum
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	<p>Fasilitasi Kerjasama Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama</li> </ul> <p>Pelaksanaan Otonomi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Biro Pemkesra
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	<p>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</li> </ul>	KP3B Serang	Kota Biro Ekbang
		Program Pengelolaan Arsip	<p>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi</li> </ul>	KP3B Serang	Kota DPAD
	Penguatan inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	<p>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</p>	KP3B Serang	Kota Bappeda

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</li> </ul>		

#### 4.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Menyusun Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan Program yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 4.12

Tabel 4. 12  
Rumusan Usulan Program/kegiatan Hasil Penelaahan  
Pokok-pokok Pikiran DPRD

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Al-gina	Rekomendasi : Agar diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 2 RKB Anggaran : 800000000
			Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan As-saadah	Rekomendasi : Agar diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 2 RKB Anggaran : 800000000
			Belum Optimalnya Sarana Pendidikan, Sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Rekomendasi : Diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 3 RKB Anggaran : 1200000000

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
			masih banyaknya anak putus sekolah tingkat SLTA di Kota Serang	Rekomendasi : Pembiayaan SMA Negeri Gratis, SMA Swasta dibantu dengan Hibah BOSDA Swasta Koefisien : 202979 Siswa Anggaran : 25000000000
			Pengelola Sekolah Swasta Atas kekurangan mebeler meja kursi sehingga membutuhkan bantuan	Rekomendasi : Agar diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 50 Set Meja Kursi Anggaran : 200000000
			Perlunya pengembangan lahan di SMAN 2 Muncang	Rekomendasi : Pengadaan Lahan Sudah dianggarkan di tahun 2022 Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 100000000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meminta Pembangunan Sekolah SMK Negeri	Rekomendasi : Usulan diproses untuk dilanjutkan pada verifikasi selanjutnya Koefisien : 1 Unit Anggaran : 50000000
Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS kesehatan atau Jamsostek	Rekomendasi : setiap tahun Dinas Kesehatan dan BPJS telah melaksanakan kegiatan rekredensialing perjanjian kerjasama antara RS dengan BPJS dalam rangka meningkatkan pelayanan Koefisien : 987 orang Anggaran : 0
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Belum optimalnya Fasilitas Pelayanan ,Sarana Prasarana dan alat kesehatan.	Rekomendasi : telah dianggarkan pengadaan alat kesehatan dan penunjang medik untuk RS Labuan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan di wilayah Banten Selatan Koefisien : 1 unit Rumah Sakit Anggaran : 0
			Ketersediaan alat kesehatan/medis kurang memadai	Rekomendasi : kekurangan alat kesehatan/medis di kabupaten/kota dapat dibantu melalui mekanisme bantuan keuangan Koefisien : 7 Unit Anggaran : 0
			Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan terutama kepada balita	Rekomendasi : pelayanan kesehatan UKP mulai dari Puskesmas/Klinik lalu ke UKM dan UKM Rujukan yaitu RS baik RSUD maupun RS Swasta Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 0
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	masyarakat kurang mampu belum memiliki kartu kesehatan dan merasakan manfaatnya (program KIS)	Rekomendasi : Dinas Kesehatan sudah menganggarkan untuk pembayaran premi BPJS, SKTM untuk warga Miskin di Provinsi Banten Koefisien : 400 Orang Anggaran : 0
	Dinas Kesehatan	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	kurang optimalnya pelayanan terhadap pengguna bpjs	Rekomendasi : setiap tahun Dinas Kesehatan dan BPJS telah melaksanakan kegiatan rekredensialing perjanjian kerjasama antara RS dengan BPJS dalam rangka meningkatkan pelayanan Koefisien : 1 Orang Anggaran : 0
	UPT RSUD Banten	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Belum adanya Pembangunan Rumah Singgah Bagi Penunggu Pasien dari Keluarga Tidak Mampu mengakibatkan teras rumah sakit sering dijadikan tempat tidur sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Banten perlu menyediakan pembangunannya.	Rekomendasi : Akan dikoordinasikan dengan Dinsos melalui bappeda Koefisien : 15 Meter persegi Anggaran : 1
	UPT RSUD Malingping	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Belum adanya Pembangunan Rumah Singgah Bagi Penunggu Pasien dari Keluarga Tidak Mampu mengakibatkan teras rumah sakit sering dijadikan tempat tidur sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Banten perlu menyediakan pembangunannya	Rekomendasi : Akan dikoordinasikan dengan dinas sosial melalui bappeda Koefisien : 15 Meter persegi Anggaran : 1

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Belum Optimalnya/Pemerataan di Desa	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Belum Optimalnya kondisi irigasi yang ada sehingga kurang efektif untuk mengaliri persawahan warga untuk itu diperlukan untuk pembangunan dan perbaikan irigasi	Rekomendasi : Perlu dilakukan survey untuk lebih memastikan lokasi Koefisien : 500 meter Anggaran : 0
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kerusakan jembatan penghubung antar desa mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	kemacetan jalan karena adanya lintasan kereta api. Masyarakat mengharapkan di bangun Flyover di Porsi Stasion untuk dapat	Rekomendasi : Jalan Jalan Provinsi Jalan Sudirman Kota Tangerang Koefisien : 1 km Anggaran : 0
			Rusaknya jalan akses utama masyarakat, yang sudah lama tidak adanya perbaikan, yang diketahui jalan tersebut sudah dilimpahkan / menjadi jalan provinsi dan perlu adanya pembangunan/perbaikan jalan	Rekomendasi : Jalan dalam Proses Menjadi Jalan Provinsi Rencana Akan dibuatkan DED nya dulu Koefisien : 10 Km Anggaran : 0
			sering terjadi kerusakan jalan yang menghambat aktivitas warga (pemeliharaan jalan)	Rekomendasi : Jalan adalah Jalan Provinsi Koefisien : 7 km Anggaran : 0
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kerusakan jembatan gantung mengganggu aktivitas masyarakat	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	belum adanya SPAL masyarakat menyebabkan membuang air limbah rumah tangga ke saluran drainase	
			Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik/regional	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Belum optimalnya Pengelolaan Drainase, Sehingga Masyarakat Membutuhkan Drainase	
			dibutuhkan perbaikan dan perawatan Drainase di Pertigaan Papanggo Cijoro Pasir	

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
			Masyarakat meminta pemasangan SPAL U-Ditch agar sistem keamanan dan kecelakaan di jalan dapat teratasi.	
			Masyarakat meminta pemasangan U-Ditch agar sistem irigasi, saluran saluran dan genangan air dapat teratasi,	
			Perbaiki Drainase/saluran air di sepanjang aliran sungai, agar tidak terjadi banjir ketika musim hujan tiba, karena jika musim hujan sering terjadi banjir	
			saluran air kotor / gorong-gorong di jalan raya ( jln provinsi ) kondisinya sudah kurang layak	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	perlu peningkatan dan pembangunan prasarana (jalan) pariwisata	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Belum terpasangnya jaringan pipanisasi menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan layanan air bersih	
			Masyarakat mengharapkan sarana air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan Irigasi. Selain itu warga berharap agar jalan lingkungan juga ditingkatkan	
			permohonan bantuan pengembangan pamsimas (penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat)	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat mengharapkan Pemerintah Provinsi Banten meninjau tanah di desa pengarengan karena tanah tidak subur lagi, air tercemar oleh polusi adanya petani tidak kebagian air sehingga masyarakat mengharapkan sarana air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan Irigasi. Selain itu warga berharap agar jalan lingkungan juga ditingkatkan	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan kelurahan se kecamatan cipocok jaya	
			kondisi jalan desa gunung kencana rusak, kurang layak dilalui kendaraan	
			Terjadinya pendangkalan dan penyempitan pada saluran air mengakibatkan kawasan permukiman strategis sering mengalami kebanjiran	
			warga mengharapkan pengaspalan di lingkungan komplek maupun lingkungan kampung	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	belum optimalnya pelaksanaan program rumah tidak layak huni	
		Koordinasi Perencanaan	Masyarakat mengharapkan perbaikan jalan lingkungan agar	

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	lebih baik di Kelurahan Poris Gaga	
		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan	
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	belum optimalnya pemeliharaan aliran saluran air (normalisasi saluran air)	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Belum optimalnya/pemerataan jalan Poros Desa	
			Belum adanya pembangunan Turap Dinding Penahan Tanah menyebabkan kawasan permukiman sering terjadi longsor dan banjir	
			belum optimalnya penerangan jalan di lingkungan desa Sukasari.(PJU)	
			Belum Optimalnya pengelolaan normalisasi saluran air, sarana dan irigasi	
			Infrastruktur jalur Kec. Cimarga - Kec. Leuwidamar	
			Kondisi penerangan jalan umum (PJU) kurang memadai sehingga berpotensi pada rawan tindak kejahatan	
			perbaiki jembatan	
			rawan longsor, sering terjadi banjir meminta agar dibangun TPT	
			Revitalisasi/Perbaikan jalan poros	
			Tidak adanya tembok penahan tanah kawasan permukiman terancam longsor	
			Belum Optimalnya Penyelenggaraan PSU sehingga Masyarakat Membutuhkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) didepan Hypermarket/Giant Pasar Kreo, Larangan	Rekomendasi : Perlu dilakukan Feasibility Study (FS) pembangunan JPO Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 100000000
			Belum Optimalnya penyelenggaraan PSU, sehingga Masyarakat butuh Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) didepan SMP PGRI dan Depan CBD Pasar Ciledug Kec. Ciledug	Rekomendasi : Akan dilakukan kajian kelayakan (FS) fasilitas penyeberangan orang Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000
			kondisi jalan di Kp Cireundeu sampai Kp Cilograng kondisinya kurang layak dilalui kendaraan diharapkan adanya pengaspalan/betonisasi jalan tersebut	
			Bangunan MCK yang kondisinya kurang layak serta fasilitas yang sudah rusak terutama untuk penyedotan air ( jet pam)	

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
			bantuan pembangunan (SPAL) Karena merusak lingkungan.	
			Belum adanya balai warga pembinaan masyarakat tingkat RT dan RW tidak optimal	
			belum adanya MCK untuk warga	
			Belum optimal nya saluran air yang berdampak banjir di saat musim hujan tiba agar kiranya pemerintah provinsi banten membantunya.(Saluran Air Uditch)	
Sosial	Dinas Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Masyarakat lanjut usia kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga membutuhkan santunan dari Pemerintah Provinsi Banten	Rekomendasi : Sudah dianggarkan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti untuk Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), sejumlah Rp. 500.000,- x 75 Orang per-Kabupaten/Kota (8 Kabupaten/Kota) Koefisien : 600 Orang Anggaran : 300000000
			pelaku usaha kecil kesulitan mengembangkan usahanya ( bantuan modal usaha)	Rekomendasi : Sudah dianggarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), sejumlah Rp. 2.500.000,- x 90 Orang (8 Kabupaten/Kota) Koefisien : 720 Orang Anggaran : 1800000000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	belum maksimalnya pemeliharaan fasilitas bagi panti jompo di Kota Serang	Rekomendasi : Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial yang Belum Memadai bagi Panti Jompo Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Koefisien : 60 Orang Anggaran : 500000000
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Belum optimalnya penyelenggaraan PSU permukiman sehingga masyarakat membutuhkan pembangunan jalan	
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>				
Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	BELUM OPTIMALNYA KEGIATAN IPSI BANTEN SEHINGGA MEMBUTUHKAN UNTUK KEGIATAN FESTIVAL SENI	Rekomendasi : Usulan diproses dengan kegiatan mengaktifkan ruang publik berkreasikan secara berkelanjutan kepada IPSI dengan tujuan berdampak secara ekonomi pada pelaku seni/ padepokan dan masyarakat sekitar. Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 500000000
Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Kurangnya pengetahuan menyebabkan sebagai pemuda kesulitan mengembangkan bakat kewirausahaan	Rekomendasi : 0 Koefisien : 1 Lembaga Anggaran : 50000000
administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	pelayanan kependudukan diberikan support dan pelayanan yang jauh lebih baik lagi, seperti pembuatan KTP, KK, akte lahir dan lain-lain nya	Rekomendasi : pelaksanaan fasilitasi pendaftaran kependudukan sesuai lokasi Koefisien : 1 laporan Anggaran : 30000000
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Minimnya pengetahuan menyebabkan Ibu-ibu rumah tangga kesulitan meningkatkan pendapatan keluarga	Rekomendasi : Bimtek peningkatan pendapatan keluarga di lokasi usulan Koefisien : 40 orang Anggaran : 40000000

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
	Kependudukan dan Keluarga Berencana	Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	MENGUSULKAN AGAR PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BISA MAJU DAN BERKEMBANG	Rekomendasi : pelaksanaan peningkatan industri rumahan perempuan di lokasi usulan Koefisien : 40 orang Anggaran : 40000000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	belum optimalnya bantuan untuk kaum perempuan	Rekomendasi : pelaksanaan peningkatan industri rumahan perempuan di lokasi usulan Koefisien : 40 orang Anggaran : 30000000
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	warga mengharapkan bantuan subsidi modal usaha kecil menengah serta bantuan alat-alat produksi dan akses pemasaran produk	Rekomendasi : Dalam renja 2023 telah direncanakan untuk kegiatan sosialisasi Fasilitas Akses permodalan melalui perbankan dan non perbankan dan terkait dengan permodalan mengacu pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koefisien : 50 orang Anggaran : 100000000
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	belum optimalnya pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM	Rekomendasi : Dengan Catatan UKM Mengacu Pada PP No 7 Tahun 2021 Dlm Renja 2023 tih di rencanakan u/ Keg. pelatihan dan pemberdayaan sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 Kewenangan Provinsi adalah Usaha Kecil yang Omsetnya 2 M s.d 15 M dan Modal Usaha 1 M s.d 10 M Koefisien : 50 orang Anggaran : 100000000
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Lebih Mengoptimalkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Agar Bisa Maju Dan Berkembang	Rekomendasi : Dengan Catatan UKM Mengacu Pada PP No 7 Tahun 2021 Dlm Renja 2023 tih di rencanakan u/ Keg. pelatihan dan pemberdayaan sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 Kewenangan Provinsi adalah Usaha Kecil yang Omsetnya 2 M s.d 15 M dan Modal Usaha 1 M s.d 10 M Koefisien : 200 JUTA Anggaran : 200000000
			Perlu Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan bagi masyarakat prakerja dan UMKM serta pembiayaan pelatihan dan pembiayaan kemitraan bersama dinas terkait, Koperasi, dan dari Per-bankan	Rekomendasi : Dengan Catatan UKM Mengacu Pada PP No 7 Tahun 2021 Dlm Renja 2023 tih di rencanakan u/ Keg. pelatihan dan pemberdayaan sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 Kewenangan Provinsi adalah Usaha Kecil yang Omsetnya 2 M s.d 15 M dan Modal Usaha 1 M s.d 10 M Koefisien : 70 Orang Anggaran : 100000000
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	warga membutuhkan pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha kecil menengah dan bantuan alat-alat produksi	Rekomendasi : Dalam renja 2023 telah direncanakan untuk kegiatan sosialisasi Fasilitas Akses permodalan melalui perbankan dan non perbankan dan terkait dengan permodalan mengacu pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koefisien : 250 orang Anggaran : 100000000



Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terjadi pendangkalan dan penyempitan menyebabkan fungsi drainase lingkungan tidak optimal	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	banyaknya polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, dan mulai punahnya pepohonan, masyarakat menginginkan adanya ruang terbuka hijau	Rekomendasi : Lokasi akan di survey untuk menentukan jenis dan jumlah pohon untuk penghijauan lingkungan Koefisien : 1000 meter Anggaran : 20000000
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan hidup menyebabkan kondisi lingkungan tidak terjaga dengan baik	Rekomendasi : Jumlah SDM dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Koefisien : 2 Lembaga bank sampah Anggaran : 50000000
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	bantuan pemerintah tidak tepat sasaran	Rekomendasi : Jumlah SDM dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Koefisien : 25 Orang Anggaran : 50000000
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Masyarakat meminta alat kebersihan berupa Tong Sampah karena lingkungan yang padat penduduk	Rekomendasi : diakomodir pada program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat Koefisien : 30 buah tong sampah Anggaran : 40000000
Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Semakin langka dan mahalnya harga kebutuhan pokok	Rekomendasi : Bisa, Untuk pemberian bantuan pangan langsung kepada masyarakat dengan beberapa kriteria yang diatur dalam Pergub No 13 Tahun 2020 Koefisien : 300 orang Anggaran : 37500000
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Harga Padi yang tidak menentu, Menghambat Perekonomian Petani	Rekomendasi : Bisa, Masuk kegiatan GPM (Gerakan Pangan Murah) Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 9000000
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	belum Optimalnya Penyediaan Prasarana Program Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Sudah diakomodir untuk pembuatan lantai jemur untuk Kabupaten Pandeglang Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 49532000
			terganggunya lalu lintas jalan warga. Masyarakat mengharapkan penataan tiang listrik yang berdiri yang mengganggu aktivitas warga	Rekomendasi : Tiang listrik dan jaringannya merupakan kewenangan PT. PLN, jadi PT. PLN yang akan menanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. PLN. Koefisien : 5 tiang Anggaran : 2500000
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	petani kurang mampu membutuhkan rumah ketahanan pangan	Rekomendasi : Bisa, Masuk dalam kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk KWT atau Kelompok Tani Koefisien : 2 Unit Anggaran : 32500000

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bi dang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	keterbatasan modal bagi pelaku usaha kecil sangat mengharapkan subsidi dari pemerintah provinsi baik langsung melalui data desa maupun bantuan melalui pinjaman Bank	Rekomendasi : Dapat ditindaklanjuti berupa kegiatan fasilitasi mempertemukan usaha kecil dengan pelaku usaha/BUMD Banten (Jamkrida) Koefisien : 120 orang Anggaran : 250000000
		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	kesulitan mengurus dokumen perizinan bagi pelaku usaha	Rekomendasi : Dapat ditindaklanjuti, kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan Koefisien : 50 orang Anggaran : 150000000
Perhubungan	Dinas Perhubungan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Belum optimalnya sarana dan prasarana penerangan jalan umum	Rekomendasi : Akan dilakukan survei pendahuluan kebutuhan PJU pada ruas jalan Provinsi yang berdekatan dengan lokasi yang diusulkan (jika dimungkinkan dapat dilakukan pemasangan PJU pada lokasi dimaksud) Koefisien : 5 titik Anggaran : 200000000
	Dinas Perhubungan	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	belum optimalnya pembangunan lampu penerangan jalan	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 15 unit Anggaran : 60000000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belum adanya PJU di kawasan permukiman rawan kecelakaan dan kriminal	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 20 unit Anggaran : 260000000
			Belum adanya PJU di kawasan permukiman rawan kecelakaan dan kriminal	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 5 Meter Anggaran : 30000000
			belum adanya PJU di kawasan permukiman rawan kecelakaan dan kriminal (PJU)	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 260 titik Anggaran : 338000000
			Belum Optimalnya Penyediaan Perlengkapan Penerangan Jalan, Sehingga masyarakat Membutuhkan Penerangan Jalan Umum	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 20 unit Anggaran : 260000000

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
			Dengan minimnya fasilitas Penerangan jalan khususnya pada malam hari, Warga masyarakat berharap adanya bantuan untuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayahnya untuk menunjang kegiatan warga pada malam hari serta meminimalisir tindak kejahatan dan juga untuk terhindar dari kecelakaan.	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 105 Titik Anggaran : 1470000000
			Dengan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), yang menyulitkan warga untuk beraktivitas terutama pada malam hari yang juga rawan akan kegiatan masyarakat yang melintasi jalan tersebut	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 20 Titik Anggaran : 260000000
			Pembuatan Zona selamat sekolah (ZOSS) di SD 1 Warunggunung	Rekomendasi : Usulan sedang dalam proses pelaksanaan pada APBD tahun 2022 Koefisien : 300 meter Anggaran : 268299680
	Dinas Perhubungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	warga meminta dipasang PJU sepanjang jalan lingkungan kelurahan cigoong	
Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	belum optimalnya pembinaan dan pelatihan	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 100 orang Anggaran : 0
		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Banyaknya pengangguran sehingga salah satu cara mengatasinya perlu diadakan pelatihan – pelatihan dan pembinaan	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0
			belum optimalnya lapangan Pekerjaan Sehingga Masyarakat Masih Banyak yang membutuhkan Pekerjaan.	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0
			Belum Optimalnya Pelatihan Kerja sehingga Warga meminta ada pelatihan khusus ibu-ibu	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 0 Anggaran : 0
			Belum Optimalnya Pembinaan dan Pelatihan kepada sehingga masyarakat membutuhkan Pelatihan pelatihan khusus	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0
			Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 100 Peserta Anggaran : 0
				Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 50 Orang Anggaran : 0
			pembangunan / penambahan Balai Latihan Kerja	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 5 UNIT Anggaran : 0
		Penerbitan Izin Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	belum optimalnya penanganan penambahan pengangguran	Rekomendasi : Akan Disesuaikan dengan Kegiatan dan Anggaran di Tahun 2023 Koefisien : 250 jiwa Anggaran : 0
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	belum optimalnya pembinaan pemuda yang masih produktif	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 100 orang Anggaran : 0
		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	banyaknya orang pribumi yang masih menganggur sehingga warga meminta lapangan pekerjaan	Rekomendasi : Akan Disesuaikan dengan Kegiatan dan Anggaran di Tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
			Kurang optimalnya penanganan Calo yang semakin banyak di lingkungan pabrik.	Rekomendasi : Direncanakan di Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Koefisien : 10 TITIK Anggaran : 0
			masalah pengangguran yang semakin meningkat di tengah pandemi covid-19 dan menyediakan lapangan kerja secara luas dan sistematis.	Rekomendasi : Akan Disesuaikan dengan Kegiatan dan Anggaran di Tahun 2023 Koefisien : 50 orang Anggaran : 0
<b>Urusan Pilihan</b>				
Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	belum optimalnya pembinaan dan bantuan alat untuk mempermudah nelayan	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 50 buah Anggaran : 250000000
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kurangnya alat tangkap ikan menyebabkan para nelayan mengalami kesulitan meningkatkan hasil tangkapan ikan laut sehingga membutuhkan bantuan Pemerintah Provinsi Banten	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 20 Nelayan Anggaran : 175000000
		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kurangnya alat tangkap ikan menyebabkan para nelayan mengalami kesulitan meningkatkan hasil tangkapan ikan laut sehingga membutuhkan bantuan Pemerintah Provinsi Banten	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 20 Nelayan Anggaran : 175000000
			Masyarakat meminta mempermudah pelayanan terhadap penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan, izin usaha pembudidayaan ikan, dan surat izin penangkapan ikan	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 180000000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	belum optimalnya pasokan ikan	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 155000000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan bantuan budidaya ikan lele	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 1500 Bibit Lele Anggaran : 100000000
			permohonan bantuan budidaya ikan	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 50 kg Anggaran : 100000000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	permohonan pengembangan peningkatan produksi home industri	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 20 unit Anggaran : 175000000
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi Pelelangan Ikan	Nelayan mengeluhkan kondisi tempat pelelangan ikan yang sudah rusak	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten  [Sub Kegiatan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan] Koefisien : 100 meter Anggaran : 150000000

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
Pariwisata	Dinas Pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Penguatan pemberdayaan ekonomi khususnya perempuan pada desa wisata	Rekomendasi : Program dan Kegiatan yang diusulkan akan diakomodir sesuai kebutuhan Koefisien : 50 orang Anggaran : 50000000
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Belum tertata dengan baik, destinasi belum secara optimal dimanfaatkan perlu adanya revitalisasi Situ Hiang Cikamunding	Rekomendasi : Dalam Rencana Kerja TA. 2023 dapat diakomodir dalam Rancangan Pengembangan Tematik Siteplan Kec. Cilograng Kab. Lebak Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 200000000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	tempat yang bagus dan strategis tetapi sarana dan prasarana tidak memadai sehingga kurangnya daya tarik masyarakat	Rekomendasi : Program dan Kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 200000000
Perdagangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Belum Optimanya Pengelenggaraan PSU Pemukiman sehingga masyarakat membutuhkan Pelebaran Jembatan	
			Tidak adanya taman bermain, Masyarakat mengharapkan adanya taman yang asri di wilayah Kelurahan Poris Gaga	
Pertanian	Dinas Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Irigasi yang sudah rusak menyebabkan sistem pengairan belum optimal sehingga perlu diperbaiki untuk mengaliri persawahan yang mayoritas penduduknya bertani	
			Masyarakat masih menggunakan alat tradisional dalam bertani	Rekomendasi : - perlu di Verifikasi Kembali - Perlu ditambahkan Data Kelompok Tani Koefisien : 1 unit Anggaran : 30000000
			Masyarakat mengharapkan bantuan untuk kelompok Tani berupa Traktor untuk meninjau kegiatan pertanian	Rekomendasi : - perlu verifikasi lapangan ulang - Perlu ditambahkan kelompok tani Koefisien : 1 buah Anggaran : 30000000
			Para petani belum mampu menyediakan prasarana pertanian sehingga membutuhkan bantuan mesin potong rumput	Rekomendasi : - perlu di Verifikasi Kembali - Perlu ditambahkan Data Kelompok Tani Koefisien : 3 unit Anggaran : 6600000
			persawahan yang datarannya lebih tinggi / tak terjangkau oleh aliran air (kering) membutuhkan Alkon penyedot air	Rekomendasi : - perlu verifikasi lapangan ulang - Perlu ditambahkan kelompok tani Koefisien : 1 unit Anggaran : 29200000
			petani masih menggunakan alat seadanya untuk membajak sawah sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama (bantuan hand tractor)	Rekomendasi : - perlu di Verifikasi Kembali - Perlu ditambahkan Data Kelompok Tani Koefisien : 1 unit Anggaran : 30000000
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Sulitnya untuk mendapatkan bibit yang kualitasnya baik, agar petani mendapatkan hasil panen yang baik agar para petani tidak merasa kecewa dalam hasil panennya yang kurang baik juga ditambah dengan kurangnya benih padi di pesawahan	Rekomendasi : bantuan berbasis Kelompok Tani dengan volume 7.500 Kg dengan kebutuhan benih 25 kg per ha maka luasan yang dibutuhkan sekitar 300 ha lahan padi sawah dengan format Demfarm Padi sawah disesuaikan dengan alokasi anggaran Koefisien : 7500 Kg Anggaran : 112500000
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	Ketersediaan Jalan Usaha Tani (JUT) kurang memadai	

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan sehingga mengusulkan bantuan dari pemerintah untuk memberikan bibit ternak bebek telur (Bibit ternak bebek telur)	Rekomendasi : ditindaklanjuti Koefisien : 150 Bibit Anggaran : 20000000
			masyarakat mengharapkan adanya pemberdayaan peternak bebek	Rekomendasi : ditindaklanjuti Koefisien : 50 ekor Anggaran : 30000000
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketersediaan Bibit jeruk serat madu kurang memadai	Rekomendasi : dikembalikan, komoditi tidak sesuai Koefisien : 4000 bibit Anggaran : 1
			Masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan bibit ternak kambing, ayam, bebek	Rekomendasi : ditindaklanjuti Koefisien : 14 Bibit Kambing Anggaran : 40000000
			Masyarakat Membutuhkan Bibit Palawija, Bibit manggis, Bibit Petai, dan Bibit Durian	Rekomendasi : 500 bibit petai 500 bibit durian Koefisien : 1000 bibit Anggaran : 150000000
<b>Urusan Penunjang Pemerintahan</b>				
	Sekretariat Daerah	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Majlis Ta'lim kurang memadai	
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantuan Dana Hibah untuk Sarana dan Prasarana tempat ibadah, baik Masjid, Mushola, maupun Majlis Ta'lim, terkait bantuan anggaran dari Pemkab mengenai pengajuan proposal dapat dipermudah secara pengadministrasiannya, oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun Pemerintah Provinsi Banten	
			bantuan rehabilitasi mushola	
			belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan pondok pesantren dan kesejahteraan guru pesantren	
			kurang insentif untuk para guru madrasah dan ponpes (bantuan kesejahteraan guru madrasah)	
			mengharapkan bantuan berupa keranda dan tenda serta tempat pemandian jenazah	
			tidak adanya sarana pendidikan baik majlis maupun madrasah ibtidaiyah	
			tidak layak nya bangunan majelis taklim (renovasi majelis taklim)	

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 untuk menjamin tercapainya sasaran, prioritas, kebijakan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, perubahan ini juga diperlukan dalam rangka penyesuaian sebagai hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah 2023.

Perubahan RKPD 2023 terkait dengan penyesuaian arah kebijakan, target, dan perubahan pagu indikatif dalam kerangka keuangan daerah juga telah memperhitungkan dan memasukkan hasil dan pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan hasil penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah Provinsi Banten dan kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK Pemerintah Pusat) Tahun Anggaran 2023.

Perubahan RKPD tahun 2023 ini juga disusun sebagai dasar didalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR